



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI IV DPR RI
DENGAN**

**DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN;
DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN TANGKAP;
DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT;
KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN
KEAMANAN HASIL PERIKANAN; SERTA
KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
PERIKANAN KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN; DAN
KEPALA LEMBAGA LLMU PENGETAHUAN INDONESIA
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
SERTA KELAUTAN)**

Tahun Sidang	:	2019 – 2020
Masa Persidangan	:	I
Rapat Ke	:	15
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat dengan: <ol style="list-style-type: none">1. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;2. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap; Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut; Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan; serta Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan; dan3. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.

- Hari, Tanggal : Senin, 25 November 2019
- Pukul : 10.45 s.d. 17.22 WIB
- Sifat Rapat : Terbuka
- Ketua Rapat : Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI/F-PG)
- Sekretaris Rapat : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Set. Komisi IV DPR RI)
- Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI
Gedung Nusantara II
Jl. Jenderal Gatot Soebroto, Jakarta 10270
- Acara : 1. Tindak lanjut pengelolaan dan pemanfaatan serta izin peredaran dan perdagangan koral/karang hias di Indonesia;
2. Membahas pembangunan *Integrated Aquarium and Marine Research Institute* di Pangandaran dan Morotai (Anggaran *Multiyears*); dan
3. Lain-lain.
- Hadir : **A. Anggota DPR RI**
Anggota dari 54 Anggota Komisi IV DPR RI:
- F-PDIP**
1. SUDIN, S.E.
 2. YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.
 3. RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.
 4. KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.
- F-PG**
1. DEDI MULYADI, S.H.
 2. FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.
 3. Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.
- F-GERINDRA**
1. G. BUDISATRIO DJIWANDONO
 2. Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.
 3. Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.
- F-NASDEM**
1. Hj. SRI WULAN, S.E.

2. Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.

F-PKB

1. EDWARD TANNUR, S.H.
2. LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.

F-PD

1. Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.

F-PKS

1. Dr. HERMANTO, S.E., M.M.
2. drh. h. SLAMET

F-PAN

-

F-PPP

-

- B. Pemerintah** :
1. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
 2. M. Zulficar Mochtar, S.T., M.Sc. (Direktur Jenderal Perikanan Tangkap Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 3. Brahmantya Satyamurti Poerwadi, S.T. (Direktur Jenderal Pengelolaan Ruang Laut Kementerian Kelautan dan Perikanan);
 4. Prof. Ir. Sjarief Widjaja, Ph.D., F.RINA. (Kepala Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan);
 5. Dr. Ir. Rina, M.Si. (Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu, dan Keamanan Hasil Perikanan);
 6. Dr. Agus Haryono, M.Sc. (Deputi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia).

JALANNYA RAPAT:

(RAPAT DIMULAI PUKUL 10.45 WIB)

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Sampurasun
Om swastiastu, namo buddhaya
Salam kebajikan untuk kita semua
Selamat pagi

**Yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia beserta
jajaran,
Yang terhormat Dirjen Perikanan Tangkap, Dirjen Pengelolaan Ruang Laut,
Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
Perikanan, Kepala Badan Riset Sumber Daya Manusia Kementerian
Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia beserta jajaran,
Yang terhormat Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia beserta
jajaran,
Hadirin yang kami hormati.**

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita berdoa memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat mengadakan rapat dengar pendapat hari ini dalam keadaan sehat *wal'afiat*.

Sesuai dengan jadwal acara rapat-rapat DPR RI Masa Persidangan I Tahun Sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam rapat konsultasi pengganti rapat Badan Musyawarah DPR RI tanggal 18 Oktober 2019 dan keputusan rapat intern Komisi IV DPR RI tanggal 31 Oktober 2019 pada hari ini Senin, tanggal 25 November 2019 bertepatan dengan hari buruh, Komisi IV DPR RI menyelenggarakan rapat dengar pendapat dengan Dirjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Para Dirjen dan Kepala Badan Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia atau LIPI dalam rangka pembahasan tindak lanjut pengelolaan dan pemanfaatan serta izin *integrated aquarium and marine research institute* di Pangandaran dan Morotai anggaran *multiyears* dan lain-lain.

Bapak Ibu yang kami hormati,

Menurut laporan dari Sekretariat Komisi IV DPR RI saat ini RDP Komisi IV DPR RI telah dihadiri dan ditanda-tangani oleh 20 Anggota dari 6 Fraksi, kalau 20 Anggota dari 6 Fraksi berarti belum kuorum jadi kita skors dulu setuju? Iya 5 menit kita skors

(RAPAT: DISKORS)

(RAPAT: DIBUKA)

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Skors saya cabut. Baik

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Acara dilanjutkan dan pada saat ini kita nyatakan bahwa rapat dengar pendapat ini dinyatakan terbuka untuk umum, setuju?

(RAPAT: TERBUKA)

Rapat dengar pendapat hari ini dimulai pukul 10.45 dan akan diakhiri pada pukul 13.00, apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 226 ayat 1 Peraturan Tata Tertib DPR RI atau kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat
2. Penjelasan para Dirjen, Kepala Badan dan Kepala LIPI terhadap agenda rapat
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI
4. Jawaban para Dirjen, Kepala Badan dan Kepala LIPI
5. Kesimpulan rapat
6. Penutup

Apakah jadwal acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Ada yang nggak setuju dong,

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Koral, koral itu ternyata ada di laut, kalau saya koral itu di darat yang dibikin batu, dibikin jalan. Koral merupakan salah satu sumber daya alam yang dimiliki oleh Indonesia yang pemanfaatannya dan pengelolaannya sudah dilakukan hampir sejak 30 tahun, sejak tahun 1990 berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya yang mengatur prinsip pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana, berazaskan pelestarian serta memperhatikan keseimbangan ekosistem untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan,
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 *junc to* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang mengatur larangan pengambilan terumbu karang di kawasan konservasi yang artinya pemanfaatan terumbu karang diluar kawasan konservasi masih dimungkinkan sepanjang tidak merusak ekosistem terumbu karang. Selanjutnya berdasarkan Pasal 65 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Terumbu dan Satwa Liar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Lembaga Pengetahuan Indonesia masing-masing telah memberikan mandat otoritas pengelolaan atau *management authority* dan otoritas keilmuan atau *scientific authority* dalam pengaturan kuota

perdagangan, tumbuhan dan satwa liar termasuk didalamnya koral baik dalam negeri maupun luar negeri atau ekspor.

Dalam perjalanannya terdapat kendala dalam pelaksanaan ekspor koral di Indonesia akibat dihentikannya penerbitan sertifikat kesehatan atau *health certificate* oleh Balai Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan sejak tanggal 3 Mei 2018 dengan alasan adanya indikasi ancaman kepunahan, terhentinya kegiatan ekspor koral dalam 18 bulan terakhir ini mengakibatkan berbagai dampak diantaranya sebagai berikut:

1. Dampak sosial ekonomi 10 perusahaan gulung tikar, 10.800 nelayan kehilangan pekerjaan, kerugian hampir mencapai 500 miliar rupiah.
2. Dampak devisa dan PNBPN tahun 2018 dibanding tahun 2017, devisa hanya 25 % dan PNBPNnya hanya 30%.

Jadi ini terjadi dua sisi aspek regulasi yang mengatur, yang satu membolehkan, yang lain melarang. Tinggal dari membolehkan dan melarang ini mana yang lebih memberikan kontribusi positif. Satu, bagi kelangsungan dan konservasi ekosistem sumber daya laut. Yang kedua bagi kepentingan ekonomi rakyat kecil. Jadi bicaranya ekonomi rakyat kecil, nanti kita bahas secara bersama-sama sehingga kedua-duanya tidak boleh saling merugikan dan saling menjatuhkan. Ekonomi tumbuh harus berbarengan dengan semakin kuatnya konservasi dan ekosistem. Konservasi ekosistem juga harus memberikan dampak bagi pertumbuhan ekonomi masyarakat khususnya para nelayan.

Dalam rapat dengar pendapat kali ini Komisi IV DPR RI juga ingin mendengarkan penjelasan terkait tindak lanjut RDP yang dilaksanakan pada tanggal 25 September 2018 yang membahas hal yang sama dengan beberapa kesimpulan diantaranya bahwa, Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia agar :

1. Terus melakukan koordinasi intensif dalam rangka pelaksanaan pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan karang hias di Indonesia.
2. Melakukan kajian lebih dalam atas rencana penghentian secara total peredaran dan perdagangan karang hias yang berasal dari induk alam.

Titik pokok utamanya adalah bahwa ada keinginan yang kuat agar karang hias ini terus ditumbuhkan dalam bentuk budidaya, sedangkan di kawasan konservasi tetap dilindungi ini kan. Tetapi untuk menunggu dibudidaya ini diperlukan waktu berapa kemudian tanpa juga melakukan perusakan terhadap aspek yang bersifat konservasi.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Selanjutnya mengenai pendalaman program *integrated aquarium and marine research institute* atau Piamari di Pangandaran dan Morotai untuk penyusunan program dan kegiatannya harus dapat dipertanggungjawabkan karena perencanaan kebijakan wajib didasarkan pada pencapaian kinerja dimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 238/PMK.02/2015 tentang tata cara pengajuan persetujuan kontrak tahun multi jama' atau *multiyears contract* dalam pengadaan barang dan jasa serta peraturan Menteri Keuangan nomor B84/Menteri-KP/2/2019 tentang

perpanjangan kontrak program *multiyears* atau tahun jamak, untuk itu semua program yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan harus sesuai dengan peraturan dan Perundang-Undangan.

Sesuai dengan fungsi pengawasan dan untuk pengembangan atau proses program seharusnya diketahui oleh Komisi IV DPR RI namun, saat ini kami belum mengetahui dan mendapat laporan selain itu berdasarkan laporan hasil Badan Pemeriksa Keuangan bahwa program tersebut ada ketidaksesuaian dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018, denda keterlambatan sebesar 1,27 miliar, ini hasil pemeriksaan BPK tahun 2018 sehingga Komisi IV DPR RI meminta penjelasan secara detail dan transparan serta mendalam terutama mengenai program:

1. Proses pengajuan program atau *urgent program* secara lugas.
2. Pelaksanaan serta pertanggung jawaban dari unsur internal badan *research* sumber daya manusia Kementerian Kelautan dan Perikanan serta pihak diluarnya atau pihak ketiganya.
3. Proses perkembangan jalan program tersebut.

Ini dari pemeriksaannya ada hal yang harus dibahas secara saksama antara aspek perencanaan, pelaksanaan teknisnya sehingga tidak terulang lagi pada perencanaan kegiatan program mendatang.

Komisi IV DPR RI memandang adanya permasalahan dimana terindikasi tidak selesai atau mangkrak dan ini bahasanya untuk disampaikan secara transparan, ini program yang kegiatan yang Pangandaran, program kegiatan di Pangandaran pekerjaannya dianggap oleh Badan Pemeriksa Keuangan belum selesai. Kalau belum selesai berarti bisa jadi ada kesalahan dalam perencanaan bisa jadi juga ada kesalahan dalam pelaksanaan teknis pekerjaannya. Bisa dua-duanya salah atau bisa dua-duanya lagi lupa.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Demikian pengantar yang dapat saya sampaikan, selanjutnya kita bersama-sama meminta penjelasan kepada Pak para Dirjen, Kepala Badan dan Kepala LIPI untuk disampaikan pada forum ini.

Terima kasih.

KETUA KOMISI IV DPR-RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Izin Pimpinan, teman-teman saya izin bertanya dulu.

Yang pertama saya ingin mendapatkan keterangan lebih jelas kenapa dua bangunan tersebut ditempatkan di Morotai dan Pangandaran? Sekarang kalau bicara riset, riset itu bukan hanya milik Kementerian Kelautan dan Perikanan, tetapi dari anak sekolah SD sampai Perguruan Tinggi bisa datang ke tempat tersebut. Kalau di Morotai misalnya anak sekolah dari Surabaya ingin tahu risetnya bagaimana si, aquariumnya bagaimana sih? Seberapa mahal biayanya. Di Pangandaran kalau dari Jakarta bingung harus naik apa? Saya minta keterangan ini sejelas-jelasnya. Jangan sampai, saya tegaskan lagi jangan sampai peristiwa Hambalang terulang kembali, ada bangunan tidak ada yang datang, tidak ada yang ngecek akibatnya ter bengkalai. Saya hanya ingatkan saja karena ini bukan uang kecil dan kita lihat juga tempat-tempat lain di Provinsi,

penyelenggaraan PON, penyelenggaraan Sea Games, selesai, ya sudah. Semua bangunan jadi berantakan, semua bangunan tidak ada gunanya. Dan saya tidak mau terjadi di dua lokasi tersebut, yang mana KKP adalah mitranya Komisi IV. Tidak baik yang KKP, tidak baiknya juga Komisi IV, berarti Komisi IV kurang pengawasan. Saya minta pihak berwenang menjawab dulu setelah itu izin Pimpinan bahwa memaparkan apa yang diperintahkan Pimpinan.

Terima kasih.

**DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Ir. WIRATNO,
M.Sc.):**

Iya, baik.

**Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Pimpinan dan seluruh Anggota
Komisi IV DPR RI,**

Pertama, kami laporkan mengenai pemilihan lokasi, pemilihan lokasi ini Pak, intinya adalah bahwa ada dua area Samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang berpengaruh terhadap situasi di dalam negeri Indonesia. Samudra Pasifik, sebenarnya ada kabar yang, Samudra Pasifik sebelah utara ada arus panas dan arus dingin turun masuk ke perairan Indonesia, terus, terus, terus, terus, nah ini stop stop, sebelumnya sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya, sebelumnya, stop. Nah ini adalah situasi kita, sebelah utara ini menghadap ke Samudra Pasifik, sebelah selatan ini menghadap Samudra Hindia. Ada arus dari utara masuk ke selatan membawa semua potensi-potensi perikanan demikian juga arus dingin dari bawah naik ke atas.

Nah kemudian yang kedua, ada lempeng, lempeng gempal dan tektonik, lempeng gempal tektonik yang berada di warna merah ini Pak. Jadi ini warna merah adalah lempeng gempal tektonik, mulai dari benua Asia dan benua Australia, kemudian menghadap kesana. Kita mengambil titik dua ini salah satunya pertimbangannya adalah merupakan jarak terdekat jadi terdekat dari Sabang sampai ke Rote, Pulau Rote sampai ke Kupang. Ini adalah jarak di tengah-tengah paling dekat adalah Piamari. Disamping memang daerah sini adalah daerah *natural resources* nya paling tinggi. Nah kemudian yang selatan, yang utara itu adalah Pasifik mulai dari Sulawesi sampai ke Papua ini warna merahnya itu titiknya di sana, jadi ini adalah *guard* Pak, garda penjaga antara utara dan selatan. Kemudian kami melakukan suatu survei, sudah dilakukan survei di daerah titik titik selatan itu yang di daerah tengah tengah itu yang terdekat mana. Di Morotai sudah ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus. Titik Morotai itu adalah kawasan ekonomi khusus yang diarahkan untuk industri perikanan dan sebagainya ke sana. Di selatan itu ada Pangandaran itu ditetapkan sebagai kawasan ekonomi khusus untuk Eko Eduwisata, eko wisata pendidikan. Jadi memang pertimbangan-pertimbangan ini yang menjadi landasan mengapa kita memilih titik, dua titik tersebut Pak dan kemudian aquariumnya nanti kami laporkan ke Bapak, ini sudah menjadi perhatian dunia aquarium mumpuni *research center* ini. Salah satunya dengan Monaco dan sebagainya mereka akan mengirim timnya ke dua titik tadi. Kemudian kapal-kapal kita juga akan terbagi dua, kita punya kapal selam untuk sampai kedalaman

2.000 meter Pak, itu akan kita letakkan di Morotai, kemudian kita juga punya ROV, itu juga diletakan di selatan. Jadi dua kapal, kapal selatan dan kapal utara, nanti kita berkomunikasi dengan LIPI dengan pihak BUPT dengan KLHK untuk masuk.

Terima kasih, Pak.

KETUA KOMISI IV DPR-RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Izin, Pimpinan. Tadi Pak Dirjen mengatakan kapal selamnya bisa ke kedalaman berapa?

DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Ir. WIRATNO, M.Sc.):

2.000 meter, kita sudah punya duluan Pak.

KETUA KOMISI IV DPR-RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Gini Pak, ya Bapak boleh ngomong apapun juga itu hak Bapak, terus nanti yang ke sana siapa? Kita nggak usah bicara Norwegia, apa nggak usah, yang mau belajar jadi ke sana siapa? Ongkosnya saja berapa Pak, kalau ke Morotai itu? Pesawatnya saja kita kan tahu. Kebetulan Bupatiya itu teman saya, Pak Benny Laos teman saya. Cuma kan rasanya ya susah diomong lah. Kenapa nggak ditempatkan di Sulawesi? Kenapa nggak ditempatkan di Jakarta? Kenapa nggak di tadi Pak Budi bilang nggak di Raja Ampat atau di Bunaken sekalian penelitian tempat wisata sekaligus bisa dikunjungi. Terus nanti untuk riset hanya para pakar riset saja? Profesor yang pergi ke sana? Dibangunnya kan untuk menambah pengetahuan. Apalagi untuk saat sekarang ini Pak, mohon maaf anak-anak sekarang kan lebih suka main *gadget* dari pada melihat wow aquariumnya hebat, besar Bapak. Ini lho saya rasa, saya juga bingung penempatannya ini lokasinya ini. Nggak perlu dijelaskan Pak, cuma saya agak sampai hal ini saja agak bingung. Yang mau datang ke sana siapa, mau ngapain, coba Pak Dedi suruh ke Morotai, mau Pak? Kalau Pangandaran masih logika, tanya coba Bapak-bapak yang ada di sini, mohon maaf, mau nggak ke Morotai? Pakai uang sendiri ke sana melihat? Belum tentu mau.

Ya Pak, saya minta tolong lain kali membuat sesuatu itu harus diperhitungkan, kan sudah terjadi kemarin. Keramba jaring apung yang teknologi mana itu, Norwegia? Norwegia kan? Teknologi jauh-jauh Pak, orang di kampung Bapak ini Purwakarta, bikin keramba apung saja ngga tenggelam. Ini pakai Norwegia pasang di laut Indonesia, kan nggak logika kan lautnya saja sudah beda, arus beda, angin beda, bulannya pasti beda antara barat dan timur.

Okey Pak Pimpinan, silakan.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik, Pak, terima kasih.

Kalau yang untuk Pangandaran memang dikunjungi tapi bukan untuk yang *research*, ya biasa yang kunjungan ke pantai, itu sudah sampai 3,8 juta yang

berkunjungnya. Tapi bukan untuk tujuan *research* si kebanyakan orang Indonesia kan tujuannya kan main gitu lho, karena lihat aquarium besarnya itu. Barangkali itu yang harus menjadi pertimbangan khusus dan selanjutnya masih ada?

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Interupsi Pimpinan, sebelah kanan.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Menyambung dari Pak Ketua tadi, ketika kemudian sebelum menempatkan sesuatu di suatu tempat kan pasti ada studi kelayakan atau studi analisa yang lain, saya pikir itu untuk diberikan ke Komisi IV Pak, sehingga apa yang disampaikan oleh Pak Ketua tadi kita melihat nyambung nggak antara studi kelayakan dan apakah disambung-sambungkan atau memang secara kajian memang nyambung itu sehingga kita minta data itu untuk diserahkan ke Komisi IV,

Terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik.

Studi yang dibuat itu kan biasanya apakah studinya dibuat oleh konsultan atau begitu kan, atau dibuat berdasarkan kajian di internal Kementerian. Silakan kalau mau dijawab dulu silakan Pak.

DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Ir. WIRATNO, M.Sc.):

Baik Pak.

Mohon izin mungkin Pak Zulfikar yang menjawab karena beliau yang menginisiasi semua program.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN 2 PERIKANAN (M. ZULFICAR MOCHTAR, S.T., M.Sc.):

Terima kasih Pak atas kesempatannya, mohon izin Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Mungkin saya sampaikan sedikit semacam riwayat kenapa Piamari ini ada, jadi tahun 2015 itu ada kunjungan ke MBARI (*Monterey Bay Aquarium Research Institute*), ada pusat riset di situ di mana di situ dilihat ada satu pusat riset yang

lengkap termasuk di riset termasuk juga dengan edukasi wisata itu di-*mix* di situ sehingga kita melihat bahwa di Indonesia ini kita tidak punya banyak pusat riset strategis kelautan padahal kita ini negara maritim yang luar biasa besar. Yang ada di kampus-kampus, yang ada di berbagai organisasi yang itu skalanya tidak kurang serius untuk merespon berbagai isu-isu terkini. Isu-isu terkini kita ini berkembang dari waktu ke waktu, ada *climate change*, ada masalah *biodiversity*, ada masalah gempa, ada masalah yang sangat besar tapi tidak ada strategi yang merespon ini secara optimal di lautan kita. Nah seperti yang disampaikan tadi, Prof. Syarif bahwa kita punya dua dimensi Samudra yang sangat strategis, ada Samudera Pasifik, kemudian ada Samudera Hindia. Samudra Hindia inilah Pangandaran itu dianggap satu titik yang bisa merepresentasikan hal tersebut, kemudian untuk *Pacific Ocean* itu dipilih akhirnya Morotai dengan berbagai pertimbangan. Setelah itu 2015 kebetulan saya belum bergabung itu mulailah ada *visibility study* untuk mengarah kesana, dari *visibility study* itu akhirnya ditentukan seperti Pak tadi, akhirnya berbagai orientasi tersebut tadi, itu dipilih lah Pangandaran dan Morotai di mana di situ menggabungkan antara riset, edukasi, wisata sebagai satu bagian untuk bisa membuka ruang pada berbagai pihak timur atau barat untuk mengakses tersebut. Setelah itu baru mulailah tahapan-tahapan teknis dilakukan ada kajian, ada DED, kemudian ada proses bagaimana kita maju ke Kementerian PU untuk mendapatkan *approval* proses-proses *multiyears contract* setelah itu kita maju ke Kementerian Keuangan untuk melihat cek prosesnya, dari situlah baru mulai pembangunan. 2017 konstruksi dilakukan sampai 2018 kemudian dilanjutkan hingga penyelesaiannya dan *alhamdulillah* sekarang ini mungkin bisa disampaikan nanti dalam paparan bahwa ini sudah mencapai 100%.

Terima kasih Bapak yang terhormat.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Izin Pimpinan, kita bicara barusan Pak Zulfikar permasalahan anggaran, ini saya lihat dibahan yang Bapak berikan barusan total anggaran itu 226 miliar, demikian Pak Syarif. Ini catatan saja Pak dari rapat kerja kita terakhir, ini anggaran yang dipaparkan untuk lamari ini totalnya 318 miliar Pak. Ini perbedaannya tolong nanti bisa dijelaskan, silakan Pak Syarif.

KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN (Prof. Ir. SJARIEF WIDJAJA, Ph.D., F.RINA.):

Iya Pak, jadi anggaran tadi itu adalah untuk anggaran gedung, fasilitas maupun untuk aquarium Pak, jadi kita belum masukkan peralatan. Jadi peralatannya masih nanti di tahun 2000 iya, itu hal yang sampai saat ini. Ya kemudian, betul, gedung sama aquarium. Kemudian berikutnya adalah tahun 2020 kita anggarkan untuk peralatannya.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik, terima kasih.

Karena interupsi tadi sudah, interupsi sudah dijawab.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ketua?

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Siap, baik, bagaimana Pak, interupsi apa Bapak?

F-GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ya memberi masukan kita FS ini Pak menurut berdasarkan pesanan Pak, *order*, jadi saya kira tidak perlu dibahas lagi terlalu jauh tinggal minta pertanggung jawaban, ini pengalaman kami Pak.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Pengalaman Bapak di mana?

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.) :

Ya waktu di Komisi IV, Pak.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Oh di Komisi IV, dikira di waktu jadi Dirjen, Bapak begitu.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Di Komisi IV kita membahas Undang-Undang Kelautan, ini contoh saja yang sangat kecil. Datanglah 4 guru besar dari perguruan tinggi ternama di Indonesia, kita membahas buaya Pak, semua guru besar sama KKP, buaya itu ikan, hanya Darori Pak yang kalah di situ, ini karena pesanan ya sampai sekarang Undang-Undang Perikanan buaya itu ikan Pak, itu kan ngga benar ikan itu aves, buaya itu lain. Ya orang anak SMP pun tanya, ya sekarang buaya ikan. Alasannya kalau yang hidup di air itu ikan, bapak nanti berenang jadi ikan Pak, sekian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik, kalau carut marut istilah kemudian identifikasi, terminologi, dalam hukum riset itu biasa, ini Undang-Undang lingkungan hidup dengan Undang-Undang Kelautan saja yang satu membolehkan yang satu melarang. Pada sebuah negara yang sama, itulah Indonesia yang harus kita bertahan bersama Pak. Baik, masih ada. Interupsi Pak? Bapak mau interupsi apa?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Interupsi Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik, masih ada? Interupsi Pak? Bapak mau interupsi apa?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Iya, pokoknya apa yang diomongin Pak Ketua saja.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Oh ya boleh, didengarin.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Baik, jadi saya menggaris bawahi *statement* Ketua, Pak Sudin tadi ya, Pimpinan. Bahwa seolah-olah kita, seolah-olah ya, kita ini mengabaikan *research*. Tadi yang perlu kita cermati bahwa segala sesuatu tindakan apakah itu untuk sebuah program atautkah sebuah membangun apa, atau suatu tindakan-tindakan yang bersifat proyek, memang perlu ada *research*, supaya apa yang kita lakukan itu ada berhasil guna dan berdaya guna gitu kan. Nah jadi cuma kita ada satu pertanyaan juga, kira-kira *research* ini memberikan manfaat atau tidak? Sebab sebuah *research* itu pun juga kalau kita cuma hanya me-*research* sesuatu tanpa ada sesuatu *background* yang kuat terhadap *research* itu, dan juga kita sudah mengetahui bahwa dampaknya itu akan sangat jelas, saya pikir *research* ini nggak penting juga gitu lho. Tapi saya mendukung adanya *research* gitu kan, tapi kita objektif saja ya kan, selama ini objektif ya kan, apakah kita perlu *research* tentang hal ini apa tidak? Nah ini yang memang harus kita kaji jadi tidak serta merta kita ini apa setuju dan tidak setuju gitu kan. Jadi kita beri kesempatan kepada Pemerintah, argumennya apa gitu kan, mau *research* *research* itu, biayanya besar atau nggak? Kalau saya melihat membaca istilah apa yang disampaikan oleh apa ini sebuah dokumen di sini, itu potensinya kan hanya kurang lebih 70 juta dollar, sekitar tidak lebih dari 1 triliun gitu kan, tapi kan kita tidak tahu *cost*nya berapa ya kan? Nah jadi memang perlu ada sebuah riset yang menghasilkan *benefit* dan *cost*nya seperti apa gitu sehingga betul betul *research*nya itu bisa kita tindaklanjuti. Kalau cuma hanya *research-research* saja menurut saya si buang-buang anggaran saja gitu, demikian Pak Ketua.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik terima kasih.

Memang kita mengalami keprihatinan bersama, bahwa salah satu kelemahan di negeri ini kurang menghargai penelitian. Para peneliti sering kali mengalami problem dalam pembiayaan penelitiannya sehingga seringkali produk yang kita buat itu tidak didasarkan pada riset yang memadai sehingga selalu gagal di pasaran atau produknya tidak bisa bermanfaat bagi masyarakat. Tetapi juga kita harus menghindari proyek *research* karena *research* yang diinginkan oleh kebutuhan Negara yang dilakukan oleh Kepala Peneliti seringkali kita abaikan tetapi riset oleh kelembagaan Kementerian dari Pusat sampai Daerah sering kali banya tapi akhirnya itu hanya akhir di pelaporan dan kepuasannya di WTP. Nah ini yang harus segera *mindset*nya kita rubah sehingga paradigmanya

ke depan kalau misalnya riset itu bisa dijalankan oleh para ahli di Perguruan Tinggi di Kelembagaan-kelembagaan Pemerintah atau non-pemerintah itu yang kita dorong agar penelitian-penelitian berkembang tidak mesti kita membuat proyek riset sedikit. Beda kan antara pendekatan riset dengan proyek riset. Nah kalau proyek riset. Kan biasanya bikin penelitian-penelitian honorinya diterima, dibuat dalam bentuk laporan, dibawa ke DPR atau disampaikan diperiksa oleh BPK seluruh persyaratan administrasinya selesai, selesai. Nah tahun depan nanti bikin riset lagi tu biasa begitu, di BAPPEDA Daerah itu banyak yang begitu proyek riset atau dicari mitra kerja yang paling mudah diajak komprominya, konsultan-konsultannya. Ini yang harus segera dibenahi. tapi riset sebagai bentuk kebutuhan pengetahuan Indonesia masih relatif tertinggal kita harus dorong itu, prinsipnya itu Pak ya. Prinsipnya itu kan?

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Begini Pak Ketua, saya sebenarnya riset ini *demen* saya, terus terang *demen*, karena memang segala sesuatu yang kita lakukan itu sebelum menangani sesuatu itu kan kita harus tahu dulu potensinya apa, manfaatnya apa, *outcomenya* apa itu kan dari *research* semuanya itu. Nah hanya saya menggaris bawahi bahwa seperti Pak Ketua gambarkan tadi bahwa hanya abal-abal, saya pikir memang kita tentu tidak setuju ya kan. Nah hanya memang kalau ini dianggap penting sebaris, saya pikir dia harus melibatkan para pihak, para pihak apakah melibatkan LIPI atautkah melibatkan lembaga riset yang lain, industri dan segala macam. Ya saya pikir supaya hasil risetnya komprehensif dan dia kita meminta garansi apakah riset ini bermanfaat tidak begitu. Kan ujung dari pada riset itu kan manfaat atau tidak.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik Pak, sudah, baik terima kasih.

Nah sehingga titik fokusnya adalah apakah pekerjaan yang di Pangandaran dan di Morotai ini dalam katagori sebuah kebutuhan riset yang menghasilkan gagasan pemikiran bagi kepentingan publik atau sekedar proyek dari sebuah kegiatan riset? Nah nanti kita kaji bersama-sama dari sudut pandang objektif bukan dari sudut pandang politik, nah gitu lho. Nah makanya kita semua bersifat objektif bahkan saya lebih mengusulkan bagi Anggota DPR yang pemikir, profesor, doktor, itu nggak usah ikut kunjungan kerja kunjungan kerja, dikasih uang riset saja agar menghasilkan gagasan yang penting bagi DPR, honorinya ditambah. Daripada ikut bolak-balik bolak-balik naik pesawat capek capek untuk dapatin SPJ, kalau gagal pikirannya itu sama dengan lulusan SMA, tepuk tangan itu ya begitu. Nanti bikin nanti ke depan BURT nya nyusunnya begitu, yang pemikir kaya Bapak Dirjen ngga usah pergi kemana-mana Pak, disini saja, Bapak bikin gagasan nanti duitnya langsung terima Pak, saya kasih Pak, nanti dibelakang Pak, baik, kita tidak ada interupsi lagi selanjutnya dipersilakan memberikan tanggapan, nanti dulu, presentasi dulu, presentasi dulu, iya. Jangan interupsi-interupsi, sudah. Kita dengerin dulu presentasinya, nanti interupsinya sejam, tanya jawabnya tiga jam, ini sama juga tidak menghasilkan apa-apa kecuali menghabiskan waktu ya. Kita dengarkan dulu paparannya. Kita lihat dari sudut pandang, pikiran dan perasaan yang jernih tanpa ada prasangka yang

negatif agar semua keluarga besar pemerintahan Republik Indonesia ini positif bagi negara.

Terima kasih, dipersilakan.

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN (Dr. Ir. RINA, M.Si.):

Bapak Pimpinan, yang koral dulu atau Piamari, Miamari?

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Yang ini dulu, Kepala Badan dulu, nah sip.

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN (Dr. Ir. RINA, M.Si.):

Oke baik, baik.

Terima kasih Bapak Ibu Pimpinan dan Bapak Ibu Anggota yang saya muliakan

Mohon ijin kami menyampaikan paparan tentang pembangunan kelembagaan riset dan teknologi kelautan, Pangandaran, Piamari, dan Miamari. Lanjut.

Nah Bapak Ibu sekalian, selama ini Kementerian Kelautan dan Perikanan sangat dikenal dengan bahwa kita berkonsentrasi pada perikanan pada ketahanan pangan dan sebagainya. Kita belum ada satu pemikiran ke arah sektor kelautannya. Jadi ini *keywordnya* di situ Pak, kita belum banyak dikenal ataupun berkontribusi untuk sektor kelautannya, kita baru fokus pada perikanan. Padahal lautan ini adalah ekosistem, ekosistem yang bisa berdampak pada kehidupan manusia baik dari sisi penyediaan pangan maupun dari sisi kebencanaan dan lain-lainnya. Ini kita lihat lautan ini berdampak pada perubahan iklim, mata pencaharian, perdagangan, keamanan dan sebagainya. Kita baru merespon kalau seandainya itu terjadi, tetapi didalam pengembangan berikutnya kita belum lakukan itu semuanya, nah ini Pak, jadi kita baru fokus pada stok ikan saja selama ini, kita baru fokus baru stok ikan saja. Lanjut.

Nah, seperti terumbu karang dan sebagainya ini termasuk sebetulnya adalah suatu media yang bisa menyerap karbon ya. Karbon kita dan ini dari LIPI dan dari kita semuanya bekerja sama untuk melihat tutupan terumbu karang di seluruh Indonesia, bagaimana posisinya kalau nanti Pak Dirjen PRL dan teman-teman KLHK dan LIPI membahas tentang pemanfaatannya, dari sisi kami ialah tutupannya, tutupannya kemudian inventarisasinya, jenisnya, koral ini jumlahnya ada 550 jenis dari seluruh Indonesia, total dunia adalah 950. Kita menguasai hampir 550 jenis, nah kami bertanggung jawab terhadap bagaimana koral-koral ini tetap bertahan gitu Pak supaya nanti di masa yang akan datang kita punya Bank Plasma Nutfah, Bank Plasma Nutfah dari koral yang nantinya akan secara bertahap akan dibiakkan Pak. Nah ini ada disini di Piamari dan Miamari ini. Lanjut.

Nah termasuk energi Pak, energi ini kita belum pernah menyentuh energi laut. Energi arus tidal Karen ini potensinya sekitar 1200 mega watt. Kalau kita lihat sekarang kita menggunakan semua energi fosil, ini fosil juga akan habis, batu bara habis, migas habis tapi seperti arus laut ini kita dikaruniani sepanjang laut ada terus tapi tidak pernah dipakai. Nah ini, ini situasi kami, kami arus sudah memulai membuat merintis di Nusa Penida ada selat-selat sempit itu bisa dipakai untuk pembangkit listrik karena kecepatan arusnya lebih tinggi dari pada kecepatan arus di tempat lain. Nah konsentrasi-konsentrasi seperti ini lah yang akan kita kembangkan. *Ocean thermal, ocean thermal* ini seperti contohnya ini daerah NTT di permukaan laut temperatur bisa sampai 40° - 50° C, tapi di kedalaman 50 meter sampai 100 meter itu bisa sampai - 5° C. Nah kalau kita punya instalasi berputar dari atas ke bawah itu bisa menghasilkan menggerakkan turbin untuk membangkitkan listrik, potensinya 43.000 mega watt. Nah ini lebih besar dari pada rencana dari Pemerintah untuk membangun pembangkit listrik dengan tenaga batu bara yang sebesar 35.000 mega watt, ini kita lebih besar. Nah, perhatian kita belum kesana Pak, kami sekarang saat ini adalah ingin memulai itu. *Ocean wave* juga demikian gelombang, selalu kita menghadapi gelombang sebagai suatu ancaman, kita lihat ada *breakwater* jatuh runtuh, pelabuhan runtuh semuanya menghadapi sebagai ancaman. Padahal pukulan gelombang itu, itu juga kita bisa memanfaatkan untuk listrik misalkan tenaga energi listrik. Nah ini saya ingin menyampaikan begini karena mengembangkan pemikiran kita tentang kelautan. Dasar hukumnya sudah ada Pak, Komisi IV Alhamdulillah tahun 2014 sudah menetapkan Undang-Undang Kelautan. Nah kami sebetulnya melaksanakan ini adalah sebagai amanah dari Komisi IV pada saat itu Komisi IV menugaskan Kementerian Kelautan untuk mulai bergerak ke sektor kelautan. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2016 itu amanah dari Komisi IV kepada kami untuk mulai melihat sektor kelautan sebagai sesuatu yang bisa kita bangkitkan sebagai potensi ekonomi yang baru. Lanjut.

Nah, demikian juga pada warisan bawah laut Indonesia. Kita punya sekitar 600 Pak, *shipwreck* jadi kapal-kapal tenggelam di seluruh Indonesia dari dinasti Ming, dari China, dari Portugis, dari Spanyol, Belanda, di bawah laut kita. Banyak tinggalan harta karun di sana, guci-guci dan sebagainya kita punya titiknya tetapi kita belum sepenuhnya mengeksploitasi sebagai wisata bawah laut. Nah ini sekarang kami akan sampaikan ke bapak ibu sekalian kerja sama kita dengan Spanyol dan sebagainya untuk mulai merintis kapal-kapal Magellan dan lain sebagainya yang ada di Tidore dan sebagainya itu di bawah laut semuanya. Nah kami belum punya *centemya* Pak, kita hanya parsial peneliti berangkat pergi kesana kemari tetapi dia tidak punya *centemya* untuk meneliti sektor kelautan ini, belum ada Pak, mohon izin.

Nah jadi ini kira-kira titik-titikya disitu Pak, ada beberapa area kapal karam bersejarah mulai dari yang utara, di utaranya Morotai itu adalah area-area Portugis Spanyol Pak, kapal-kapal Portugis Spanyol ada di sana. Kemudian yang China, itu dari Laut China Selatan ke bawah, kemudia kapal-kapal Belanda itu bekas Perang Dunia ke II mulai ada di barat Sumatera dan sebagainya. Ini peluang-peluang kita, *next*.

Nah sehingga sebetulnya ini potensi laut, ini kalau kita lihat yang disampaikan oleh Pak tadi Pak Hermanto, sebetulnya kita baru menyentuh perikanan saja 312 triliun per tahun, selebihnya kita belum pernah menyentuh Pak. nah jadi termasuk juga mengambil bioteknologi bahan-bahan koral dari

bawah laut yang *soft coral* misalkan bisa dipakai untuk pigmen dan sebagainya itu kita belum kembangkan, sama sekali belum kita kembangkan Pak. Jadi kita sekarang baru main di daerah 312 triliun saja selebihnya kita belum, baik *next*.

Nah tadi saya jelaskan mengenai kebencanaan, jadi mungkin kami tidak tampil di media, banyak tidak tampil di media tapi sebetulnya dengan BMKG dengan segala macam kita kerja sangat keras sekali. Jadi kita meletakkan beberapa titik-titik sensor tsunami dan sebagainya itu di wilayah-wilayah sensor tsunami, itu di bawah kendali kita semuanya.

Nah, Bapak Ibu sekalian likuifaksi tsunami di Palu itu juga kerjaan dari KKP, kita membantu sana tetapi mungkin tidak yang lebih kuat adalah BNPB sama kita kurang sosialisasi. Ya jadi, ini ada lempeng ini ada lempeng Asia batasnya sini, ini adalah Pasifik, ini adalah lempeng Australia. Nah, lempeng ini semua adalah lempeng-lempeng gunung api, ini sebelah utara, mungkin hal yang baru ya Pak di Komisi IV tapi kita bicara bencana. Jadi memang sebetulnya adalah tupoksi dari KKP yang kita belum pernah ekspor selama ini. Jadi ini titiknya, jadi tadi kembali melanjutkan apa yang saya sampaikan Pak Sudin tadi, kenapa Pak Ketua, kenapa kita main di daerah sini karena kita memang ini daerah bahaya Pak. Meskipun untuk potensi untuk wisata untuk energi segala macam besar. Lanjut.

Nah ini kira-kira, pentingnya dua samudera populasi jadi kita bekerja sama dengan IORA. Jadi seluruh Negara-Negara yang berbatasan dengan Samudra Hindia itu mempunyai kepentingan yang sama Pak jadi kita akhirnya titik itu menjadi titik untuk melihat. Kemudian tsunami, gempa, perubahan iklim daerah sini semuanya. Kemudian potensi sumber daya alam, minyak *offshore*, perikanan tangkap dunia dan seterusnya itu di sini. Kita belum pernah melepaskan kerja sama untuk *high size* Pak, jadi perikanan kita ini baru perikanan yang didalam wilayah Indonesia, tapi perikanan yang luas diluar luatan Hindia maupun Samudra Pasific masih terbatas sekali. Contohnya WSPC Pacific itu hanya 22 kapal, padahal kita punya kuota besar dan kita belum pernah meneliti ke sana yang pasifik ini. Di selatan kita hanya 165 kapal yang masuk ke *Indian Ocean* jadi ini masih daerah yang gelap, ini daerah yang gelap sekali, iya. Jadi kita perlu memberanikan diri masuk ke wilayah yang baru tadi karena kita negara besar, kita perlu melihat potensi-potensi yang baru yang harus kita bangun, *next*.

Nah sehingga parameternya adalah potensi sumber daya laut sebagai bahan kajian, kita melihat ini, populasi penduduk di pesisir yang dapat dilayani, keterjangkauan lokasi suplai kebutuhan logistik dari *delivery* hasil pembangunan teknologi tiga hal ini yang menjadi pertimbangan kita. Nah sehingga ini karakter fisiknya ini adalah *ring of fire, ring of fire* dunia itu seperti ini. Nah kita bermain di daerah lautan Hindia sama yang menghadap ke utara, kemudian arus ini ya, *upwelling java upwelling system moonson system* ini ke utara ini arus dingin naik ke utara, arus panas turun ke selatan lah ini yang menjadi pertimbangan kita untuk melihat seperti ini, terus. Nah akhirnya kita melihat ini adalah Piamari, kita punya studi kelayakan nanti kami laporkan ke Pimpinan terus. Nah ini Pak, jadi kita punya konsep piaman seperti ini, ini adalah gedungnya sudah jadi 100%. Jadi kalau tadi disampaikan mungkin ada persoalan, mungkin tidak sepenuhnya ada persoalan Pak, karena ada apa namanya *multiyears* yang tidak dipercepat diperbaharui sehingga ada masa dimana belum ada pembaharuan *multiyears*, itu yang dikenakan denda tapi sekarang sudah diselesaikan dan dibayar semua.

Ini gedungnya, ya ini ini adalah untuk *schooling aquarium* jadi untuk ikan-ikan yang bergerombol itu akan diletakkan di sini. *Tunnel* adalah untuk ikan yang jarak panjang ini, panjangnya ini 47 meter, kalau yang ini 32 meter, nah seperti ini bentuknya Pak, *next*.

Nah, kami membuat menyiapkan tempat-tempat kajian ini adalah *flume tank* untuk membuat model gelombang dan seterusnya di laut, di pesisir. Nah untuk energi, ini adalah bengkel kerjanya, permodelan, mekatronika, dan ini ada beberapa peralatan yang kita sudah punya. Kita punya kapal *research* yang untuk *ocean going*, kemudian kita juga punya kapal selam tadi yang saya bilang yang saya laporkan ke Bapak, Ibu sampai 2000 meter, juga ROV (*Remote Operated Vehicle*) yang tanpa orang. Jadi pakai *cable* turun ke bawah dengan kamera melihat ke bawah itu yang kita lakukan Pak jadi itu kedalaman sampai 650 meter. Kami kemarin ikut membantu pada waktu kapal hilang di Danau Toba, itu kita ikut membantu untuk seperti itu, lanjut.

Nah ini gedungnya Pak, gedungnya sudah selesai. Piamari yang atas, ini gedungnya, gedung aquariumnya selesai 100%, gedung *research* gedung dormitorinya. Dormitorinya untuk 20 kamar 40 orang, kelasnya bintang 3, targetnya adalah untuk para peneliti LIPI dan sebagainya dari luar itu untuk bisa bergabung di sini. Ini *schooling aquariumnya*, *tunnel aquariumnya*, *main aquariumnya*. Miamari ini belum selesai, bangunannya selesai tetapi aquariumnya kita rencanakan 2020, ini gedung aquariumnya. *Next*

Nah ini Pak, jadi ini adalah contoh alat tsunami, sensor tsunami yang kita sudah kita pasang Pak, sepanjang pantai selatan Pulau Jawa. Nah ini akan menjadi pusat *control room* untuk semua sensor tsunami tadi. Kami sudah bekerjasama dengan BMKG dan sebagainya, BMKG akan memasang timnya di sini, jadi BMKG akan memasang timnya di sini karena kita sudah lebih dahulu dengan mengendalikan seluruh titik sensor tsunami ini. Kita akan bergabung dan bekerja sama dengan Dirjen Tangkap untuk meletakkan sensor tsunami di pelabuhan perikanan, 538 pelabuhan perikanan ini yang akan kita taruh di sana. *Control roomnya* disini, di *research center* ini, *next* lanjut.

Nah ini *seaplan* nya Miamari yang Morotai, seperti ini. Terus ini Miamari sebagai *center*, ini gedungnya sudah selesai Miamari, dan kita, ini ROV kita, kita sudah beli Pak, ini lebih dulu, pengadaan 2014. Kita punya ROV yang bisa menyelam sampai kedalaman 650 meter, nah ini sangat berguna untuk Miamari yang di yang di Morotai. *Next*.

Nah Bapak Ibu sekalian kami lapor ke Bapak, Korea Selatan kerja sama dengan Indonesia untuk memanfaatkan *platform-platform* minyak yang sudah yang depositnya sudah habis, jumlahnya 408 *platform*. 408 *platform* ini deposit minyaknya sudah habis kami menjadi Ketua Konsorsium dengan ESDM, Migas, SKK Migas sebagainya, untuk memanfaatkan, *oil platform* yang sudah habis ini dipakai untuk apa? Ini kita dengan kerja sama dengan Korea Selatan. Jerman ini kita kerja sama untuk penanganan tsunami tadi. Monaco ini adalah kita sekarang kita mulai untuk membuat Bank Plasma Nutfah untuk koral Pak. Jadi kita berharap 550 jenis koral sebelum dibudidayakan masuk ke kami dulu akan ada semacam lab, bukan lab apa namanya *library*, perpustakaan koral. Sehingga suatu saat seandainya ada yang rusak hidup, koralnya hidup, bukan mati. Koralnya hidup, kita mampu membiakkan, ini menjadi semacam *grandparent stock* untuk koral, itu kita letakkan disini. Nah itu kita dengan Monaco, dibantu

dengan *expertise* Monaco, mereka dan kita mengumpulkan dari seluruh Indonesia diletakkan di situ. Kemudian Spanyol kita kerja sama untuk jalur rempah. Jadi jalur rempah ini semua kapal-kapal Portugis, Spanyol turun ke Indonesia banyak yang tenggelam, karena itu kita pakai untuk *marine heritage* tadi ya Bapak Ibu sekalian.

Kemudian Rusia, itu kerja sama dengan untuk penelitian laut dalam. Jadi di laut-laut dalam Indonesia itu banyak palung-palung, kita kerja sama dengan mereka untuk melihat kira-kira potensi mineral, migas dan sebagainya ini bagaimana? Jadi Bapak Ibu sekalian, ini akan menjadi *center* untuk nah hasil dari *research* ini, kita akan serahkan kepada Dirjen Teknis, untuk melanjutkan, untuk bisa memanfaatkan hasil *research* tadi. Belum pernah Pak, ini pertama kalinya di Indonesia kita punya laboratorium kelautan yang komprehensif, lanjut.

Nah ini anggaran kita selama ini jadi ini memang panjang 2016 direncanakan, 2017, 2018 jadi memang sangat sangat hati-hati sekali kita melakukan dan perlahan-lahan anggarannya juga tidak langsung mendesak besar. 2020 yang tadi saya laporkan ke Bapak ini ada beberapa peralatan termasuk peralatan yang kita belum siapkan, lanjut.

Terima kasih, *next*, ini sekilas saja lampiran sebentar, ini adalah *roadmap* kita, *roadmap* kita apa saja yang tadi disampaikan studi kelayakan. Ini adalah *roadmap* kita untuk pembangunan, lanjut. Ini adalah beberapa kontraktor-kontraktor yang siapa saja yang melaksanakan, sudah selesai semua Pak pekerjaannya. Jadi perencanaannya siapa, konstruksinya siapa, pelaksana pembangunan gedung siapa, kemudian aquariumnya dari mana, ini teknologi dari China ya, Bapak Ibu sekalian, terus. Kemudian yang Miamari ini, pekerjaannya sudah selesai, terus. Ini desain gedungnya seperti ini desainnya, lanjut. Ini bentuk kolamnya aquariumnya seperti ini, ada yang tinggi ada yang *schooling*, ada yang *tunnel*, ini modelnya *tunnel*, jadi untuk ikan-ikan yang berlayar agak jauh, dia pakai *tunnel* ini. Ukurannya yang ini 32 meter, untuk teater ini, bisa untuk apa namanya demonstrasi, *schooling*, untuk ikan-ikan *schooling*, *tunnel* sekian. Terus, desain risetnya ini terus *dormitory* ini, lanjut.

Nah ini Pak, ini sudah jadi Pak, ini sudah jadi sekarang pekerjaan menanami rumput segala macam, saya siapkan karena tunggu musim hujan, lokasinya di tanah timbul. Jadi ini adalah sungai muara sungai, laut, ini laut, tanah timbul ini diatas sungai kita menjadi tanah negara, kita tidak beli tanahnya, karena tanahnya tanah timbul tanah negara, kita bangun disini, sudah selesai, *next*.

Nah ini Piamari, strukturnya sudah selesai semuanya 100%, lanjut. Kalau berkenan ada kunjungan spesifik kami dengan senang hati Pak kami akan menunjukkan, ini Pak, siap Pak, siap, dengan senang hati. Iya Pak, siap Pak, dengan senang hati Pak, kami akan. Ini Pak ini anunya Pak, kamar-kamarnya bagus, ya untuk bisa tinggal disini Pak, ya makan-makan, iya, lanjut. Gedung dan seterusnya, rumah pompa, sudah selesai semuanya Pak pekerjaannya, terus. Iya Ibu? ada ada Bu, sebentar Bu, ini ini dokumen khusus gedung, nah ini, ini adalah sudah jadi Pak, ini adalah yang *main aquarium* yang 32 meter, ini adalah *tunnel* bentuknya seperti ini, ini yang *schooling* sudah selesai semua, terus. Nah ini Pak, ini pada waktu kemarin pada waktu uji coba ikannya belum kami pasang karena kami masih menyesuaikan domestikasi ikan. Ini bentuk anunya, sudah diuji, kuat tidak ada rembesan, terus. Nah ini Pak, ini tingginya 7 meter, bentuknya seperti ini, lanjut.

Nah ini yang Miamari, Miamari seperti ini bentuknya lebih sederhana, lebih kecil dari pada Pangandaran. Karena memang kita melihat seperti arahan Pak Ketua tadi, memang tidak banyak pengunjungnya tapi kita fokus pada *researchnya*, *next* lanjut. Gedung *researchnya* lebih kecil ukurannya, terus, nah terus. Nah ini dokumentasinya sudah jadi Pak, bangunan bangunan semua sudah jadi, tetapi aquariumnya belum jadi Pak, baru tahun 2020, lanjut. Ini bentuknya sudah siap semuanya, terus, ini konstruksi sudah siap semuanya aquariumnya tapi belum terpasang aquarium, terus. Nah ini peralatan-peralatannya Pak, ini adalah contoh laboratorium untuk gelombang Pak, ini ada jadi kita membuat gelombang buatan, sehingga kita tahu untuk suatu instalasi pembangkit listrik kalau diletakkan dengan gelombang sekian berapa dan seterusnya. Ini peralatan-peralatan kita, *pressure tank* juga ada, terus.

Nah ini adalah beberapa contoh peralatan-peralatan kita sudah siap, jadi kita sudah punya barang-barangnya tapi masih di kantor Ancol Pak, kita belum sampai ke laut lepas, lanjut. Terus ini manfaatnya, tadi Pak Hermanto menyampaikan manfaatnya apa, ini manfaatnya Pak. kontribusi pada pantai eksplorasi laut, kita belum ada sekarang ini baru, infrastruktur untuk mitigasi kebencanaan *ocean thermal*, dan seterusnya energi, *next*.

Nah ini kita sekarang punya peta kerentanan pesisir dan sebagainya, ini lampirannya Bu, ini tadi saya ringkasannya lampiran nanti kami sampaikan ke Ibu, lanjut. Nah ini *buoy-buoy*, jadi kita meletakkan *buoy* seluruh Indonesia, ini contoh-contoh bui yang kita punya Pak, nanti *central control roomnya* ada di Pangandaran maupun di Morotai, ini *buoy-buoy* untuk gelombang, terus. Nah ini contoh yang kita pasang di Selat Sunda, contoh untuk tsunami kemarin kita letakkan disini. Nah ini nanti semua *control roomnya* di sini, tarik ke sini, terus.

Nah jadi Piamari juga sebagai *shelter*, kalau kita lihat gedung Piamari ini Pak, karena memang diletakkan di tempat lokasi Tsunami, maka lantai 1 nya kosong Pak. Jadi dia memang akan masuk dia akan lepas, tsunaminya akan lepas di bawahnya gedung, jadi kita memang siapkan untuk itu, terus.

Nah ini beberapa target kepulauan Morotai, Teluk Tomini terus, ini *resources*, satu yang juga anu juga adalah *geothermal*, ada panas bumi ada gunung-gunung api di bawah laut. Gunung-gunung api dibawah laut ini kalau kita bisa mengelola bisa menjadi sumber energi baru Pak. Jadi gunung api di bawah laut, ini yang sekarang, ini bentuknya seperti ini Pak, ada semacam *bubble-bubble* di sini, seperti di Selandia, ya seperti di Selandia kita punya, terus.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Baik saya rasa, terus terus, terakhir Bu, terus. Nah saya rasa demikian.
Terima kasih.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Interupsi Boleh?

KEPALA BADAN KARANTINA IKAN, PENGENDALIAN MUTU, DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN (Dr. Ir. RINA, M.Si.):

Baik saya rasa demikian, terima kasih

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bapak dan Ibu Anggota yang terhormat,

Kita satu Kepala Badan dulu atau biar selesai semua Dirjen ini? Satu dulu ya?

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Pimpinan, Pimpinan?

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Ya, silakan.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Mohon maaf Pimpinan, supaya alur dari pada rapat ini berjalan dengan baik, mungkin saya baru penyesuaian karena lama tidak di ruangan ini. Kita berikan kesempatan dulu narasumbernya atau mitra kerja kita, sehingga interupsi-interupsi itu jangan dibudayakan. Karena materi atau substansi yang dibuat dalam interupsi juga sebetulnya materi pendalaman. Kayak tadi mohon maaf ya, kan kita belum mendapatkan penjelasan secara utuh, tetapi kita sudah berdebat tidak tahu apa yang kita perdebatkan. Oleh karena itu saya sepakat usulan selesaikan semua baru kita melakukan pendalaman dan kalau mungkin kita nggak pas, kita bentuk Panja, untuk pendalaman lebih lanjut, demikian.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terima kasih.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E.):

Pimpinan, boleh? Bukan bukan interupsi, masalah mendetail materi tetapi untuk.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Silakan, setengah menit.

F-NasDem (Hj. SRI WULAN, S.E):

Siap, siap, siap.
Terima kasih Pimpinan.

Jadi saya harap begini tadi kan, saya mengikuti apa yang disampaikan Bapak, tetapi banyak bahan juga yang tidak ada di kita, nah itu tolong dilengkapi dulu, jadi itu saja Pimpinan.

Terimakasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Sepakat tadi saran biar selesai dulu penjelasan secara utuh setelah itu tanggapan dari seluruh Anggota DPR RI, silakan Pak Dirjen Perikanan Tangkap dulu silakan.

DIRJEN PERIKANAN TANGKAP KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (M. ZULFICAR MOCHTAR, S.T., M.Sc.):

Terima kasih.
Sudah, jadi di sini dalam rangka karena sebelumnya saya yang menjadi Kepala Badan Riset Pak, tahun 2016 sampai 2018, jadi satu seri Pak.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terima kasih, silakan.

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI, S.T.):

Izin Pak, mengenai koral.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Pengelolaan Ruang Laut.

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI, S.T.):

Siap,

Pak Pimpinan dan Anggota yang kami hormati,

Di hari yang baik ini izinkan kami menjelaskan terkait dari aspek regulasi, status perdagangan, kondisi eksisting terumbu karangnya yang ada di Indonesia dan pengelolaannya. Tadi sempat disinggung oleh Pimpinan, terkait ini ada aturan perundangan dari dua Kementerian sebelah saya ini juga sahabat saya

Pak dari KLHK ya memang bertolak belakang. Kami dapat sampaikan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan sesuai dengan tugas fungsinya memiliki kewajiban untuk mengelola sumber daya ikan dan menjaga lingkungan pesisir dan pulau-pulau kecil agar tetap lestari, agar sumber daya alam tersebut dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Negara saat ini dan juga sampai kapan pun.

Pada rapat dengar pendapat pada hari ini dengan Komisi IV yang kami hormati, kami akan menjelaskan terkait aspek regulasi, status perdagangan, kondisi yang ada dan juga pengelolaannya dengan memperhatikan program pemerintah terkait konservasi terumbu karang, isu dan permasalahan pada saat ini dan juga langkah-langkah penyelesaian solusi dan kebijakan *Slide* ketiga Mas.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang di Indonesia setidaknya ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, *junc to* Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009, Pasal 7 ayat 6 yang disebutkan bahwa terumbu karang merupakan salah satu jenis ikan sehingga tanggung jawab dan kewenangan pengelolaannya ada pada Menteri dan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menyadari arti penting ekosistem terumbu karang ini kami juga mendapat memiliki Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 *junc to* Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dalam Pasal 35 tegas disebutkan bahwa larangan tentang larangan penambangan, pengambilan terumbu karang di kawasan konservasi dan atau pengambilan terumbu karang yang menyebabkan presentase tutupan terumbu karang hidupnya menjadi kurang dari 50% pada wilayah yang diambil. Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber Daya Ikan di mana pada Pasal 53 nya menyebutkan bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan ditetapkan sebagai otoritas pengelola konservasi sumber daya ikan termasuk dalam pelaksanaan konvensi CITES. Namun demikian 11 tahun sejak penetapan tersebut KKP masih belum dapat melaksanakan mandat Pemerintah sesuai dengan PP yang kami sebutkan tadi.

Seluruh perizinan untuk spesies termasuk yang masuk dalam Appendiks CITES masih dilakukan oleh KLHK termasuk semua jenis ikan dan biota perairan yang tanggung jawab pengelolaannya harusnya sesuai dengan PP tersebut di wilayah KKP. Berkaitan dengan aspek usaha ada Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 menyebutkan bahwa perdagangan terumbu karang masuk dalam sektor kelautan dan perikanan namun dijelaskan dalam lampiran Keppres bahwa untuk perdagangan terumbu karang yang berdasarkan dari pengambilan dari alam masuk dalam bidang usaha tertutup. Sedangkan perdagangan terumbu karang yang bersumber dari budidaya atau transplantasi masuk dalam bidang usaha terbuka dengan persyaratan. Ketentuan lain tentang perdagangan terumbu karang adalah Keppres Nomor 43 Tahun 1978 tentang ratifikasi CITES yang pada intinya menyampaikan komitmen Indonesia untuk mengikuti ketentuan CITES dalam perdagangan internasional atau ekspor semua spesies yang masuk Appendiks CITES. *Slide* selanjutnya, terumbu karang keras atau ordo skleratinia, lanjut, *next slide*. Termasuk ke dalam daftar Appendiks II CITES sejak 2004 sehingga perdagangan internasional atau ekspornya dilaksanakan melalui ketentuan konvensi CITES.

Beberapa ketentuan perdagangan untuk spesies Appendiks II diantaranya perdagangan atau ekspor spesies Appendiks II CITES harus dilengkapi izin

berupa CITES *exit permit* yang diterbitkan oleh *management authority*. Ekspor Appendiks II dapat bersumber dari hasil pengambilan dari alam atau budidaya dan pengembangbiakkan. Setiap negara yang akan mengekspor Appendiks II wajib menyusun dan menerapkan dokumen NDF atau *Non-Detrimental Finding* berdasarkan prinsip panen lestari yang memuat aspek legalitas, aspek keberlanjutan dan aspek ketelusuran.

Selanjutnya, berdasarkan data LIPI selaku wali data terumbu karang Indonesia memiliki terumbu karang dengan luas 2,5 juta hektare dan jumlah spesies yang tadi disampaikan oleh Profesor Sarif adalah 569 spesies. Ekosistem terumbu karang merupakan salah satu habitat penting berbagai sumber daya ikan, mempunyai peranan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem pesisir dan juga melindungi wilayah pesisir dari hempasan gelombang laut, serta menjadi salah satu objek penting dalam wisata bahari. Terumbu karang yang sehat juga menjadi perhatian penting bagi KKP karena mempengaruhi keberlanjutan perikanan karang yang menjadi sumber penghidupan banyak masyarakat dan juga nelayan yang mengambil ikan-ikan karang tersebut dengan rata-rata sesuai data yang kami dapatkan yaitu sebesar 29 juta US dollar dan mencapai nilai terbesarnya pada tahun 2016 yaitu mencapai 32 juta US dollar. Data LIPI pada tahun 2018 menunjukkan bahwa kondisi terumbu karang Indonesia yang baik saat ini hanya 29,52 yang berada dalam kondisi baik, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Indonesia merupakan satu negara pengekspor terumbu karang yang salah satunya berasal dari pengambilan alam. Berdasarkan fakta di lapangan ditemukan beberapa pengambilan koral dari alam yang tidak sesuai ketentuan perundangan yang berlaku oleh karena itu Pemerintah perlu melakukan evaluasi dan melakukan langkah-langkah untuk memastikan agar kerusakan terumbu karang di Indonesia tidak semakin parah, selanjutnya.

Beberapa program kebijakan Pemerintah berkait konservasi terumbu karang yang sedang berjalan adalah antara lain 2008 sampai sekarang Indonesia melaksanakan program rehabilitasi terumbu karang dalam rangkaian program *coremap*, yang dibiayai oleh *loan* dan juga *grant* dari luar negeri, dengan salah satu tujuan program ini adalah menjaga kelestarian ekosistem terumbu karang. Dalam forum internasional Indonesia merupakan inisiator dari kerja sama regional 6 negara dalam lingkup *coral triangle initiative*. Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dipercaya juga menjadi salah satu Pimpinan atau *coacher* dalam *international coral reef initiative* sejak 2018 sampai 2020, selanjutnya.

Dalam data *dashboard* di depan menunjukkan bahwa ekspor karang hias asal Indonesia pada periode 2002 sampai 2016 sebesar 59% dari hasil transplantasi dan 41% berasal dari pengambilan alam. Data tersebut tidak termasuk ekspor *dead rock* atau karang mati dan *live rock* atau karang mati yang ditumbuhi oleh algae. Selanjutnya. Ekspor koral hias Indonesia bersumber dari hasil pengambilan alam masih di dominasi oleh jenis koral dengan laju pertumbuhan lambat. Ini dari penelitian terakhir oleh Pak Suharsono tahun 1998, selanjutnya.

Berdasarkan hasil survei lapangan yang dilakukan oleh UPT kami, hingga saat ini masih ditemukan permasalahan terkait kegiatan pemanfaatan koral atau karang hias diantaranya adanya pelanggaran terhadap Pasal 35 Undang-

Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 yaitu kegiatan pengambilan terumbu karang yang dilakukan di kawasan konservasi, setidaknya ada di Kepulauan Bangka Belitung, Banten, NTB, NTT, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Dapat kami sampaikan kawasan konservasi ini di Negara Indonesia ini dikelola setidaknya 3 Pak. Ada KKP yang mengelola 10 kawasan konservasi perairan Nasional, ada KLHK dengan 7 Taman Nasional Lautnya dan ada kawasan konservasi perairan daerah, yang dikelola oleh Provinsi dan juga sudah mendapatkan penetapan. Pelanggaran terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir, Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengambilan yang dilakukan juga dilokasi dengan persentaseutupan karang kurang dari 50%, di Bangka Belitung kami temukan Banten, NTB, NTT, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan dan Lampung. Pengawasan dan penegakkan hukum terhadap pelanggaran Pasal 53 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil tidak berjalan optimal karena pelaku yang melanggar memiliki surat izin pengambilan yang diterbitkan oleh Pemerintah juga dalam hal ini KLHK.

Pengawasan kegiatan pengambilan terumbu karang sulit dilakukan atau tidak dilakukan dalam di waktu pengambilan di dalam laut dan juga keterbatasan aparat pengawasan. Perdagangan terumbu karang yang bersumber dari hasil pengambilan alam tidak selaras dengan kebijakan Pemerintah melindungi habitat sumber daya ikan, pelestarian terumbu karang dan juga pada Perpres Nomor 44 Tahun 2016 disebutkan bahwa kegiatan budi daya transplantasi karang hias masuk dalam sektor kelautan dan perikanan dimana perizinannya diperoleh oleh KKP dengan rekomendasi dari KLHK akan tetapi saat ini perizinannya masih berada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, *slide* selanjutnya.

Dalam upaya menyelesaikan permasalahan ini, KKP telah melakukan langkah-langkah koordinasi dan komunikasi dengan *stakeholder*. Setidaknya pada tanggal 7 November 2019 kami Menteri KKP beserta kami sudah mengadakan atau mendengar audiensi dari pengurus asosiasi koral, kerang dan ikan hias Indonesia dan juga minggu lalu hari Jumat Bapak, kami juga sudah Menteri KKP dan jajarannya sudah mendengarkan audiensi dari Kelompok Pembudidaya Karang Hias Nusantara pada tanggal 22 November 2019. Dari pertemuan tersebut didapatkan beberapa rumusan, ini juga opsi Pimpinan dan Anggota untuk bisa kita diskusikan dan kita sepakati. Ekspor karang hias yang berasal dari hasil pengambilan dari alam untuk sementara waktu ditutup. KKP membutuhkan waktu untuk melakukan kajian bersama secara komprehensif dengan Kementerian terkait dan juga LIPI tentang perbaikan tata kelola harmonisasi dengan regulasi terkait, larangan pengambilan terumbu karang dan juga pencegahan potensi kerusakan yang lebih besar, mengingat kegiatan pengambilan karang di tingkat lapangan sulit untuk diawasi. Ekspor karang hias hasil transportasi akan dibuka kembali oleh KKP dan KKP akan menyiapkan teknis pelaksanaan serta kajian terkait permasalahan tersebut termasuk lokasi-lokasi pembudidaya dan yang lainnya diharapkan dapat selesai pada *mid-Desember* 2019 ini Pak. Sebelum perdagangan ekspor atau ekspor koral karang hias dibuka kembali akan dilakukan *stock opname* hasil koral hias hasil

transplantasi pada perusahaan sebagai dasar pemberian surat rekomendasi di UPT kami dan juga prasyarat penerbitan *health certificate* oleh Badan Karantina.

Menindaklanjuti upaya penyelesaian permasalahan koral, karang hias KKP mengusulkan beberapa alternatif solusi yaitu untuk perdagangan karang hias, hasil pengambilan dari alam untuk sementara waktu dihentikan. Selama periode penghentian tersebut kami melakukan pengkajian secara komprehensif sebagai dasar kebijakan jangka panjang serta sebagai pertimbangan adanya *omnibus law* tentang penyederhanaan perizinan investasi saat ini terdapat enam bidang usaha tertutup diantaranya adalah pemanfaatan spesies Appendix I dan pengambilan koral alam baik yang dilakukan oleh pelaku usaha pemilik modal dalam Negeri atau asing dan perdagangan koral hias yang dari ke transplantasi dapat dilakukan kembali dengan pengawasan dan kontrol yang ketat. Ekspertir juga didorong untuk meningkatkan jumlah spesies terumbu karang yang dapat ditransplantasi dan juga perlu adanya kesepakatan terkait tata kelola pemanfaatan perdagangan karang hias antara KLHK dan KKP. Mengenai tanggung jawab dan otoritas, slide selanjutnya.

Mengenai tanggung jawab dan otoritas pengelolaan terumbu karang, KKP bermohon untuk tujuan efektifitas pengelolaan peningkatan pengawasan dan harmonisasi kebijakan, pengelolaan terumbu karang sebaiknya dilakukan oleh KKP dengan pertimbangan : terumbu karang merupakan habitat penting sumber daya ikan, pengelolaan terumbu karang mempunyai keterkaitan yang erat dengan tugas fungsi Kementerian Kelautan dan Perikanan, KKP memiliki sarana dan prasarana yaitu SDM untuk melakukan pengawasan yang lengkap di wilayah laut untuk kepastian iklim berusaha dan efektifitas pengelolaan dan kelancaran pelayanan publik perlu segera diputuskan otoritas atau *management authority* CITES untuk spesies perairan atau jenis ikan termasuk terumbu karang segera dapat dialihkan dari KLHK ke KKP, koordinasi kami sudah berlangsung dari tahun 2010 Bapak dan sampai saat ini belum disepakati. Perlu dukungan dan masukan Komisi IV DPR untuk dapat memfasilitasi tindak lanjut penyelesaiannya, demikian dari kami Bapak penjelasannya.

Terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Walaikumsalam.

Silakan Kepala Badan Karantina, oh sama ya. Pak Dirjen Pak, Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, KLHK silakan.

**DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Ir. WIRATNO,
M.Sc.):**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

**Selamat siang, salam sejahtera
Bapak Pimpinan, Komisi IV Anggota Komisi IV**

Kami akan menyampaikan terkait dengan penyelesaian, hambatan, perdagangan karang hias alam dan transplantasi, bisa ditayangkan?

Tentang kondisi terumbu karang Indonesia tahun 2018 dari 1.067 transek monitoring terumbu karang, lanjut, itu yang 36,18% dalam kondisi buruk atau jelek, sedangkan total *excellent* dan *fair* itu sekitar 63,82%, lanjut. Terumbu karang Indonesia, jumlah terumbu karang disampaikan tadi 569 sebetulnya jumlah yang diperdagangkan sekitar 70 jenis atau 12,3% sebetulnya. Sementara terumbu karang Indonesia 2,5 juta merupakan 14% dari total luas terumbu karang dunia. Lanjut.

Ini regulasi pengelolaan spesies berdasarkan 590 yang tadi juga diperdebatkan prinsip-prinsip kehati-hatian juga diterapkan dan dasar-dasar ilmiah untuk mencegah terjadinya kerusakan atau degradasi populasi. Lanjut.

CITES tentang CITES, otoritas CITES berdasarkan PP Nomor 8 Tahun 1999 Pasal 65 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar di mana *management authority* di waktu itu Kementerian Departemen Kehutanan sebagai otoritas pengelola *management authority* dan LIPI sebagai otoritas keilmuan atau *scientific authority*. Berdasarkan Menhut 104/2003, Direktorat Jenderal PHKA waktu itu ditetapkan sebagai pengelola *management authority* CITES sampai dengan saat ini. Sedangkan keputusan Ketua LIPI Nomor 1973 Tahun 2002, Pusat Penelitian Geologi ditetapkan sebagai pelaksana otoritas keilmuan atau *scientific authority*, kami sampaikan kepada Pimpinan bahwa *scientific authority* ini, otoritas CITES di satu negara bisa lebih dari satu.

Dua, prinsip pemanenan lestari. Satu, penenan karang dilakukan di luar kawasan konservasi dan di luar kawasan wisata. Dua, panen dilakukan dibawah kecepatan regenerasi dari karang. Ketika panen dibatasi dengan ukuran yang ditetapkan S/M/L dan jumlah dibatasi dengan kuota. Empat, karang dipanen pada lokasi yang telah dilakukan survey untuk kelayakan potensi panen. Lima, pengambilan karang harus selektif dan dengan kehati-hatian. Jika harus memecah koloni karang sesedikit mungkin melukai karang induknya. Enam, pengambilan *base rock* dan *substrate* adalah yang sudah terlepas tanpa harus mencongkel atau menggali. Tujuh, penanganan paska pengambilan harus dikemas secara baik dan satu persatu untuk menghindari kematian akibat transplantasi. Selanjutnya, ini *history* penghentian pelayanan *health certificate* oleh KKP sejak 3 Mei 2018 sehingga sampai dengan saat ini ekspor baik alam maupun transplan terhenti selama 18 bulan, pokok persoalannya. Dampak penghentian HC itu ada dampak ekonomi, sosial ekonomi, perusahaan, tenaga kerja dan seterusnya. Dampak terhadap pasar internasional hilangnya kepercayaan pasar internasional, pasar koral dunia saat ini 80% diambil alih oleh Australia, kita tidak mudah untuk mengambil alih kembali pasar internasional. Dampak terhadap devisa dan PNBP cukup besar, capaian devisa 2018 hanya 25% dari tahun 2017, dampak dari penutupan tersebut, lanjut.

Ini *commodity TSL* 5 besar dari periode 2015 sampai 2018 yang memberikan kontribusi nilai ekspor terbesar ada di KLHK ada *rosebud*, ada reptil, ada *agarwood* dan ada 4 *fish* dan koral. Koral memberikan nilai ekspor hampir setengah triliun pada periode 2015 sampai 2018, lanjut. Devisa dan PNBP karang hias rata-rata pada 2015 sampai 2017 sebagaimana tergambar 149 miliar per tahun devisa negara dan PNBP sekitar 1,1 miliar per tahun. Selanjutnya, saat

ini terdapat pengedar karang hias luar negeri, 48 perusahaan yang mengambil dari alam dan 52 perusahaan budidaya transplantasi 52, lanjut.

Ini hanya informasi tentang surat edaran BKIPM yang mementingkan pelayanan hasil sejak 3 Mei 2018 dan sejak itu memang berhenti. Hasil RDP selanjutnya RDP Komisi IV DPR tanggal 25 September, dan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi tata kelola karang hias difasilitasi Kemenko Perekonomian tanggal 5 Oktober 2018. Komisi IV meminta pemerintah BKIPM, Denpasar dan BKIBM Mataram KKP untuk segera mencabut surat larangan izin lalu lintas koral dan anemon dalam rangka meningkatkan nilai ekspor nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang terlibat di dalamnya. Surat edaran sudah terbit dari BKIPM tentang pencabutan pelayanan. Namun di lapangan pelayanan tidak, tetap tidak dilakukan.

Solusi selanjutnya, kami usulkan solusi. Satu, pengambilan karang hias tidak di lokasi kawasan konservasi laut yang ditetapkan Kementerian KKP. Selama ini dari 11 provinsi terdapat 3 provinsi yang lokasi penangkapan pengambilannya bersinggungan dengan KKL KKP yaitu di Bangka Belitung, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tenggara. Dua, solusinya pengambilan karang hias, tidak di lokasi kawasan konservasi laut Kementerian LHK. Tiga, dilakukan pengawasan bersama antara Kementerian KKP dengan Kementerian LHK di lokasi pengambilan karang hias dalam hal tidak melebihi kuota sesuai dengan jenis yang ditetapkan per provinsi, dilibatkannya nelayan setempat dalam pengambilan dan tidak menimbulkan konflik sosial dengan masyarakat nelayan setempat. Selanjutnya lokasi baru yang diusulkan sebagaimana peta terlampir, lanjut. Misalkan ini yang di Belitung Timur, yang biru ini lokasi yang diusulkan untuk pengambilan secara alam sehingga tidak bersinggungan dengan lokasi kawasan konservasi dari daerah ya. Yang kedua usulan, lanjut, ini usulan pengambilan karang hias alam di Nusa Tenggara Barat demikian juga diharapkan tidak yang biru adalah lokasi yang diusulkan tidak bersinggungan dengan lokasi yang kawasan konservasi KKP. Selanjutnya yang di Nusa Tenggara Barat juga yang di Teluk Saleh, juga demikian, lokasi-lokasi yang biru ini yang diusulkan pengambilan karang alam yang tidak bersinggungan dengan kawasan konservasi tadi. Di Sulawesi Tenggara juga demikian, ada di lokasi yang secara aman tidak berada, baik di kawasan konservasi laut Kementerian LHK maupun dengan KKP.

Lokasi-lokasi existing pengambilan yang tidak bersinggungan misalnya ini selanjutnya ini ada di Sulawesi Selatan, yang biru biru ini ada lokasi lokasi yang tidak bersinggungan. Kemudian, ini yang harus dilakukan adalah tadi kami menekankan pentingnya monitoring bersama Bapak Pimpinan, bahkan dengan LIPI saya kira, dengan LIPI, dengan KKP dan dengan Kementerian LHK dilakukan *monitoring* bersama sehingga prinsip *traceability*, lacak balanya bisa dilakukan dan memastikan bahwa itu tidak termasuk prinsip 50%. Kalau kawasannya lebih dari 50% tidak bisa diambil lagi. Demikian barangkali yang bisa kami sampaikan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pimpinan, izin Pimpinan.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Silakan, Pak.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Jadi Pak Dirjen, nanti kalau di *monitoring* dibuat sanksi, apabila, apabila mereka membuat pelanggaran harus dibikin sanksi seberat-beratnya. Karena kalau nggak nanti mereka pikir, oh hanya sanksi administrasi, besok ulang lagi tempat lain, saya nggak mau terjadi seperti itu. Dan ini kita jadikan pelajaran dan Pak Dirjen pasti juga tolong diperhatikan di Babel itu masih ada penambangan pasir timah di laut. Itu lebih jahat dari pada yang sekarang ini, ya Pak ya, tolong ya. Terimakasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Yang terakhir dari LIPI.

DEPUTI ILMU PENGEMBANGAN TEKNIK LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA (Dr. AGUS HARYONO, M.Sc.):

Terimakasih Bapak Pimpinan.

Mohon maaf mohon izin. Bapak Kepala LIPI tidak bisa hadir karena ada rakor di Kemenristek, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Saya sebagai Deputi Ilmu Pengembangan Teknik mewakili Kepala LIPI, melaporkan bahwa sesuai dengan PP Nomor 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, LIPI ditunjuk sebagai *scientific authority*. Dan tadi disebutkan bahwa sesuai dengan keputusan Ketua LIPI Nomor 1973 Tahun 2002 pusat penelitian biologi ditunjuk sebagai pelaksana otoritas keilmuan atau *scientific authority* namun LIPI baru saja melangsir peraturan LIPI yang baru terkait dengan tata kelola organisasi dan pengeluaran rekomendasi terkait konvensi hayati termasuk didalamnya CITES dan CBD. Yang mana dalam tata kelola yang baru tersebut nantinya tim pengolah tersebut akan melibatkan pihak eksternal tidak hanya LIPI tetapi memungkinkan peneliti lain termasuk dari KKP, KLHK ikut terlibat di dalam tim *assessor* untuk bersama-sama mendalami data-data terkait dengan CITES tersebut. Dan kami juga perlu informasikan bahwa rekomendasi dari *scientific authority* memang sifatnya wajib tetapi tidak mutlak untuk menjadi keputusan yang dikeluarkan oleh *management authority* karena itu *management authority* memiliki kewenangan yang penuh terhadap perdagangan biota objek CITES yang menimbang tentu menimbang rekomendasi yang dikeluarkan rekomendasi ilmiah yang dikeluarkan oleh *scientific authority* dalam hal ini adalah LIPI, serta hal-hal lain yang mungkin dianggap perlu. Oleh karena itu kami mengundang dari KKP maupun KLHK yang mungkin ada penelitiannya disana juga ikut bersama-sama dengan LIPI tadi ada ajakan untuk saling berkoordinasi, saya kira itu sangat bagus dan kebetulan peraturan LIPI yang baru mengamankan untuk tidak hanya melibatkan peneliti LIPI tapi juga peneliti-peneliti di luar. Termasuk juga

civitas dari kampus tentu banyak peneliti-peneliti dari kampus yang baik ya di beberapa tempat yang bisa dilibatkan sebagai tim assessor di dalam menilai keberadaan dan dari biota objek dari CITES.

Terkait dengan terumbu karang mungkin Pak Augi sebagai Kepala Pusat Oceanografi. Nah di kami beberapa pusat ini terkait dengan CITES itu adalah Pusat Penelitian Biologi, Pusat Penelitian Oceanografi, Pusat Penelitian Laut Dalam. Karena kalau menurut Keputusan LIPI Tahun 2002 Nomor 1973 hanya disebutkan Pusat Penelitian Biologi, namun dengan peraturan yang baru ini kita bisa melibatkan multi unit kerja dan *stakeholder* eksternal bersama-sama mencari data terkait dengan objek CITES ini.

Terima kasih, silakan Pak Augi.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Izin Pak Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Saya kira mungkin apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Deputi IPT, tidak perlu saya ulang lagi. Tapi mungkin saya kita lanjutkan saja mungkin ada hal-hal teknis yang bisa kami klarifikasi nanti kami sampaikan, saya kembalikan ke Pimpinan.

Terima kasih.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Walaikumsalam

Terima kasih Bapak dan Ibu Dirjen Kepala Badan dan LIPI yang telah memberikan penjelasan.

Selanjutnya ada hak anggota untuk bicara, memberikan saran dan pendapat sekaligus pertanyaan sebagaimana hak saudara bicara saya mohon tertib sebagaimana ketentuan tatib, 3 menit maksimal. Akan bijak manakala 1 menit maksimal 1,5 menit. Uji nyali bijak nggak, silakan Amsi Lena, Lema.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

PDI Perjuangan, Dapil NTT, silakan.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Selamat siang

Salam sejahtera buat kita semua.

Ketika kita bicara soal pengelolaan dan pemanfaatan koral ini, saya kira ada tiga pendekatan yang harus kita gunakan. yang pertama pendekatan terhadap *people*, *profit* dan *planet*. Maksudnya apa? *People* ya harus ada *benefit* buat masyarakat, buat nelayan. *Profit* harus ada keuntungan terhadap negara berupa pemasukan terhadap negara dan juga korporasi. Dan yang ketiga terkait dengan *planet* itu terkait dengan sustainabilitas ekologis. Kalau kita bicara koral, koral ini kan sumber daya alam terbarukan sehingga dapat dimanfaatkan karena sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Indonesia dan juga peraturan pada level internasional ataupun global. Sejauh ini yang saya tangkap koral alam ini baru dimanfaatkan kalau tidak salah 0,001% dari koral yang dimiliki oleh Republik Indonesia ini. Padahal sebenarnya ada kajian yang dilakukan oleh pihak otoritas dalam hal ini *scientific authority* Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengatakan bahwa koral alam dan koral budidaya Indonesia ini sebenarnya kalau dioptimalkan ini akan menimbulkan dampak ekonomi yang cukup luas, kalau kita bicara soal pendapatan, saya mencatat situ dari ekspor saja bisa menyumbang devisa sampai angka 70 juta US dollar per tahun. Penyerapan tenaga kerja ada sekitar 12 ribu Kepala Keluarga, kalau dikonversi bisa mencapai 50.000 jiwa. Dan dalam perspektif lingkungan hidup sebenarnya kalau kita merujuk pada rezim internasional atau pun peraturan internasional misalnya dari CITES ataupun juga pendekatan akademis yang dilakukan oleh LIPI sebenarnya tidak ada persoalan. Tetapi ini rapat dengar pendapat yang kedua kalau tidak salah terkait dengan koral ini Kementerian KKP itu mengambil sikap atau pun kebijakan untuk tidak memberikan pelayanan publik terkait dengan ekspor koral ini yang berdampak kemudian bahwa ekspor koral ini tidak bisa dilaksanakan. Dan tentu ini juga merugikan berbagai pihak yang terlibat atau *multi stakeholder* di sana. Saya ingin tanyakan kira-kira kajian akademi seperti apa sehingga kemudian KKP itu sampai pada kesimpulan, saya tidak tahu melarang atau tidak memberikan pelayanan publik tetapi dampak dari tidak memberikan pelayanan publik itu adalah ekspor tidak bisa dilakukan. Saya ingin mendapatkan penjelasan terkait dengan kajian akademis, kajian yuridisnya, kajian ekologisnya, sekaligus kajian ekonomisnya. Jadi tolong karena terkait dengan koral ini, ini *multi stakeholder* ada di dalam dan pendekatannya juga harus *multi paradigmatic*.

Yang kedua Pak Dirjen, Pak Dirjen tadi sepertinya pukul rata yang namanya terumbu karang dan koral, setahu saya itu berbeda. Pak Dirjen lebih paham dari saya. Terumbu karang menurut saya itu rumah habitat yang tidak boleh diganggu, kalau koral boleh saja diekspor, itu hewan yang kira-kira seperti itu. Tadi saya melihat tidak ada dikotomi ataupun diferensiasi antara terumbu karang dan koral ketika dijelaskan.

Yang kedua untuk Komisi IV kita, saya agak terganggu tadi ketika bicara riset. Riset itu ada dua, *field-research*, riset lapangan, yang kedua *library research*, riset perpustakaan. Mengambil data itu juga bisa dari data pustaka, di laboratorium, perpustakaan, bisa juga data lapangan. Data itu ada, data primer, sekunder dan data tersier. Karena itu menurut saya kalau mau valid, mau akurat, ya Anggota DPR harus turun ke lapangan juga untuk melihat itu. Mengapa? Supaya kita bisa membenturkan realitas fakta lapangan ini, empiris, data empiris ini dengan data tekstual. Riset itu harus kontekstual, maksudnya apa? Ruang

dan waktunya terpenuhi, teksnya juga terpenuhi. Maka riset itu tidak bisa hanya sekedar tekstual tetapi kontekstual. Nah ini saya ingin luruskan supaya kita komisi IV paham soal ini.

Sekian dan terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terimakasih, selanjutnya Pak Darori.

F-GERINDRA (Ir. KRT H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Terimakasih Pak Ketua.

Pak Dirjen, ini rapat soal koral yang kedua atau ketiga ya? Ini memang Pak Ketua, karena ada dua Undang-Undang yang saling merasa berkuasa, akhirnya jadi masalah, saya ingin kronologisnya sedikit Pak. bahwa Undang-Undang menyangkut koral itu masuk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati termasuk laut itu dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Pada saat itu Kementerian KKP masih Dirjen di Kementerian Pertanian. Nah dengan munculnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 mengenai pulau-pulau kecil dan pesisir atau sebaliknya, ini terjadi dualisme ya bahwa apa yang dilakukan oleh Kementerian Kehutanan, Dirjen KSDA itu sebagai *management authority* itu berdasarkan dari *scientific authority* dari LIPI. Jadi apa yang dilakukan oleh KSDA itu berdasarkan dari LIPI. Selama ini ekspor itu tidak ada masalah, itu ya, dan memang pernah kita masalahkan pada tahun 2009 Kementerian KKP minta kewenangan kita bertemu rapat dengan KKP waktu itu Dirjennya masih Pak, Sekjendnya Pak Samsul, kita beri delapan taman nasional Pak. Coba KKP kami beri delapan kegiatan dan akan ditambah lagi setelah dinilai oleh BPKP nah sampai sekarang belum. Nah terakhir Undang-Undang Nomor 590 kan mau direvisi ya, tapi kenyataannya diujungnya tidak bisa dilakukan karena di dalam Undang-Undang Nomor 590 diselipkan Undang-Undang Genetik yang justru bobotnya hampir 70%, Undang-Undang konservasinya itu ditinggalkan. Sehingga Menteri Kehutanan dengan Bu Siti itu minta kepada DPR untuk ditunda. Nah sekarang ada dua Undang-Undang, mau tidak mau kita harus sepakat ya, jadi saya kira kami harapkan Dirjen dari KKP dan Dirjen KSDA itu duduk bersama apakah itu kerja sama MOU antara Menteri dan Menteri atau cukup Dirjen dengan Dirjen atau Peraturan Presiden. Karena kemarin waktu posisi Bu Menteri ngotot minta bagian tugas dari pada laut oleh Bapak Presiden tetap dikelola oleh Kementerian Kehutanan. Nah ini kan periode yang kedua ini seperti apa? Kalau seperti ini ribut terus ya, saya kira ini tidak perlu lah karena semua kita Pemerintah itu kan di bawah Presiden.

Jadi Pak Ketua, yang rekomendasi saya mungkin didalam kesimpulan agar kedua Kementerian ini duduk bersama menyepakati mana yang akan dikelola oleh kelautan, mana yang dikelola oleh Kehutanan. Ini perlu ya, karena kalau nggak seperti ini akan ribut terus ya. Bahkan kemarin waktu ada Pak Menteri saya katakan yang bisa dijadikan makan itu dikelola oleh Kelautan, yang tidak bisa dimakan dikelola oleh Kehutanan, itu kan gampang. Lumba-lumba kan nggak bisa dimakan ya terus arwana tidak bisa dimakan, saya kira gampang itu ya. Contoh-contoh seperti itu mudah itu karena *authority* atau pun CITES itu

masih di Kehutanan ya. Kalau memang dulu saya usulkan, kalau memang ini Undang-Undang Nomor 590 dihapus, pejabat di Kehutanan dari mulai Direktur, Kasubditnya, Seksinya bisa pindah ke Kelautan. Lebih gampang dari pada mendidik yang baru. Kami setuju waktu itu, tapi sampai sekarang nampaknya kok belum ya, saya kira ini yang perlu kita lakukan. Terus yang kedua, ini kebetulan ada Bu Karantina, Pak Ketua. Undang-Undang Karantina sudah ada, tapi Kementerian Pertanian tidak mau membentuk Badan Karantina Terpadu. Nah sekarang ini saya tanyakan apakah sudah ada kesepakatan antara Kementerian untuk mengawasi peredaran ya masing-masing punya kelebihan. Sekarang peredaran contohnya ada di Bandara Soekarno Hatta karena kehutanan itu ada di bibirnya ada diluar saja ngawasannya, itu penyelundupan seperti kayu gaharu itu luar biasa, sebaliknya juga masuk perikanan. Jadi saya kira kami sarankan kalau Kementerian Kehutanan dan Kelautan itu sudah kompak, setuju menjadi satu badan, tetapi pertanian kok tidak mau kenapa? Ya ini tanda tanya saya dari dulu gitu. Dua Menteri sudah setuju, karena kalau ada di jadi satukan Pak, tidak perlu menambah orang, tidak perlu tambah sarana, anggarannya juga sudah ada tinggal menyatukan. Bahkan pernah saya katakan Menteri Pertanian jadi Kepala Badan Karantina pun merangkap sampai seperti itu, tapi nampaknya sampai sekarang terpaksa disahkan tapi akhirnya tidak bisa berjalan.

Jadi Bu Rina sama Pak Winarno saya kira duduk bersama segera membuat kesepakatan sehingga tidak sampai ke DPR. Nah tadi saya kira soal koral, karena ini otoritanya masih di Kehutanan, jadi sementara ini bersama-sama LIPI, Kehutanan sama Bu Rina untuk mengecek mana yang akan diekspor oleh perusahaan. Kalau memang itu betul-betul dari budidaya ya silakan, kalau dari alam yang seperti apa yang dibolehkan dari 550 jenis yang boleh yang mana. Itu kan ada Appendiks I, II yang, mungkin Appendiks III mungkin diberikan ya kan? Saya kira itu Pak Ketua, yang bisa saran saya nggak bolak-balik seperti ini, kasihan perusahaannya yang tadi dikatakan ada sekian miliar kerugiannya.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terima kasih, selanjutnya, Mba Riesky. Maksimal 3 menit, bijak 1 menit setengah.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.) :

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Bapak-bapak, sebelumnya saya mohon maaf saya ini Anggota baru. Jadi tadi ada satu kalimat, saya kan agak bingung ya terkait pembangunan kelembagaan riset, kita tidak, saya senang ada lembaga riset itu dan teknologi terutama terkait dengan hal-hal ini. Hanya tadi ada kalimat, tolong ralat saya juga kalau saya salah bahwa terbentuknya hal ini juga amanah dari Komisi IV yang saya tidak tahu terkait apa gitu, iya, ada berarti ada memang. Nah kalau boleh saya tahu Pak, kan kita kan ada kesimpulan rapat boleh tahu nggak waktu itu diskusi ini di bulan berapa? Saya ingin baca jadi saya nggak blank juga gitu lho. Saya minta dikeluarkan, Sekretariat ya kalau boleh nanti koordinasi saya butuh tahu rapatnya kapan tentang apa.

Karena begini Pak, ini kan pastinya *big project* lah ya, sedikit banyaknya saya kepinginnya sudah kita membangun ini hasilnya jelas, gitu loh. Dari tadi saya mikir masalah kelautan ini ada berapa banyak universitas kita yang memang fokus terkait kelautan beserta isi isinya, itu satu.

Terus kedua, *impact* terhadap *sorrounding* di dalam daerah itu, gitu loh. Otomatis kan kita pada saat membuat suatu penelitian gitu itu harus ada *goal achievement*nya apa, ini menurut pendapat saya, gitu kan. *Achievement*nya seperti apa, karena kita sama-sama sepakat bahwa nelayan ini termasuk yang kesejahteraannya juga belum baik koral atau apapun itu yang terkait laut kita ini kita belum berdaulat diatas laut kita sendiri. Nah kemudian, *output* riset ini untuk apa? Konkritnya yang karena gini kami wakil rakyat ya, sinkronnya konkretnya yang berkepentingan yang hasilnya ini memang betul untuk kepentingan rakyat apa gitu lho? Karena kan kami harus menjelaskan kan, harus bisa menjelaskan begitu. Nah kemudian, memang betul Bapak bicara untuk, oh ya kalau bisa nanti kunjungan kesana, oke lah.

Nah terus saya agak, ini pertanyaan yang agak agak menggelitik saya juga, ini ada museumnya ya Pak? Bener nggak si nanti? Atau cuma riset saja? Aquarium, *is it open for public* atau bagaimana? Oke *open for public* itu berarti *free* atau ada *charges*? Nah karena begini lho, ini *grand design*, nggak tau ya kalau dalam bisnis itu ada *action plan*, *bussiness plan*, *action plan*, *goalnya* apa kan begitu lho, nah saya kepingin tahu itu. Berapa pekerja lokal juga yang dilibatkan di situ, kan begitu. Jangan kita minta orang, kita mengkritisi misal cuma ke beberapa daerah, oh banyak orang asingnya disitu, pekerja kita kok tidak dipekerjakan nah kita juga harus begitu gitu loh. Nah itu saja Pak, yang pasti saya agak tolong digarisbawahi karena saya anak baru sekali lagi lho pak ya. Yang rapat sebelum ini yang menghasilkan ini saya kepengen tahu jadi saya tidak terlalu mengawang-awang membaca ini, hulu hilirnya kita paham, itu saja.

Terima kasih

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Pak Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Iya, terima kasih Pak Ketua.

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Berikan kesempatan gabus ada yang lebih cepat ada yang.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pak Ketua, Anggota dan Pak Sekjen dan Dirjen KKP

Saya ingin menyoroiti soal ini ada hasil survei lapangan, ada 6 temuan, diantaranya berbentuk pelanggaran. Jadi kita belum menemukan bentuk pelanggaran dari pengelolaan terumbu karang ini seperti apa ya, apakah terjadi perusakan atau kah terjadi pelanggaran terhadap aturan tatib dan segala macamnya. Nah ini seperti apa pelanggaran itu, kita juga perlu tahu ya kan. Kalau misalnya bersifat abstrak ya, dan tidak ada rincian, tentu kami sebagai Anggota DPR tidak bisa memberikan solusi apa begitu. Nah seenggaknya kami ingin mendapatkan penjelasan secara rinci pelanggaran-pelanggaran itu apa saja. Tadi disebutkan disini ada pelanggaran terhadap Pasal 35 Undang-Undang Nomor 27. Kemudian ada lagi *junc to* Nomor 1 Tahun 2014, dan saya juga melihat disini temuan itu adalah kesulitan melakukan pengawasan. Nah ini sebab-sebab sulitnya pengawasan itu apa, apakah karena kekurangan sumber daya manusianya atautkah kekurangan peralatannya atau kah kekurangan teknologinya? Karena kalau kita cermati, hidup dan kehidupan serta ekosistem di bawah ruang laut itu, itu seperti apa melakukan pengawasannya gitu kan. Kalau bisa kami tahu juga Anggota DPR misalnya perlu menyelam, itu alatnya apa? Bisa kita awasi secara bersama-sama ya kan. Seperti apa si realitasnya kehidupan di ruang bawah laut itu? Pak Tio mungkin bisa menyediakan ya? Bisa ini kita menyelam ya kan, kedalaman berapa begitu kan? Sehingga kita mendapatkan suatu gambaran yang utuh baik secara teoritis maupun secara kenyataan di lapangan. Jadi kita mencoba untuk mengkombinasikan sehingga solusinya itu memang komprehensif dan tidak menimbulkan pelanggaran-pelanggaran berikutnya gitu kan.

Nah, sisi lain juga saya menemukan ini ada dua Kementerian yang tidak sinkron ya kan antara KKP dengan KLHK. Ya di mana izinnya itu dipegang oleh KLHK, sementara KKP ini adalah sebagai pemberi izin tetapi ekornya dipegang di Kementerian yang lain. Nah tentunya ini, ini perlu diselesaikan ya kan, apakah memang izinnya ini, ya kalau melihat ruang lingkupnya apa, kalau menyangkut itu adalah lingkungan hidup ya kan, berarti memang adalah Kementerian Lingkungan Hidup. Tapi kalau dia adalah menyangkut soal produksi, soal budidaya, nah ini adalah mungkin ini adalah ruang lingkupnya KKP ya. Jadi memang perlu ada suatu segmentasi kegiatan sehingga kita bisa merumuskan izinnya ke mana ya kan. Jadi memang harus ada pemetaan terhadap di lapangan supaya nanti Kementerian pun juga, Kementerian Kelautan tidak serta merta gitu kan dan tidak mengalami kesulitan dalam melakukan pengawasan. Saya menduga ini sulitnya melakukan pengawasan karena medannya dan teknologinya terbatas dan juga karena antara dua Kementerian saling ego sektoral. Nah ini perlu minta penyelesaiannya.

Nah kemudian dari LIPI saya melihat sudah memberikan argumen bahwa 2.500.000 itu adalah kawasan terumbu karang Pak ya? Berarti itu proporsionalitasnya sangat sedikit sekali. Tapi kita tidak mengetahui berapa potensi ekonomi yang ada di situ? Berapa potensi ekonomi yang ada, kemudian berapa yang bisa digarap. Dan sebab karena ini adalah menyangkut lingkungan hidup dan disitu terdapat 595 spesies, kita kan tentu ada pemetaan-pemetaannya mana yang bisa boleh digarap mana yang tidak ya karena ini adalah menyangkut lingkungan hidup. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Kementerian bahwa untuk yang budidaya koral yang budidaya saya pikir ini kan bisa dikembangkan gitu kan, ini boleh saja dikelola dengan baik tapi ini harus melibatkan masyarakat. Harus melibatkan masyarakat sehingga

apa yang kita kerjakan itu ada dampak ekonominya kepada masyarakat. Karena saya masih konsen dengan persoalan kita berusaha anggaran ini harus bisa memberantas kemiskinan di sektor nelayan ya, ini harus ada dampak positifnya, ada benefitnya, sosial benefitnya itu harus ada. Kemudian terkait dengan alam saya pikir memang dengan harus ada koordinasi terus dengan lembaga-lembaga riset yang lain karena ini adalah menyangkut kehidupan makhluk secara keseluruhan. Jangan sampai nanti kita terjebak pada satu ayat mengatakan telah terjadi kerusakan di darat dan di laut ya kan, lantaran perbuatan manusia. Kita ini juga manusia kan, Pemerintah manusia, DPR juga manusia, perusahaan swasta juga manusia di situ. Kalau semuanya serentak melakukan kerusakan di situ dan manusianya tidak mau melakukan penjagaan lingkungan saya pikir ya sudah ini bencana alam akan berturut-turut, ini akan menimpa Indonesia ya. Ini memang harus kita perhatikan.

Kemudian terakhir saya ingin menyinggung lembaga riset. Saya pikir riset ini baru kali ini dilaporkan secara komprehensif, kita tidak tahu A sampai Z sampai sekarang. Saya pikir memang ini perlu dilakukan semacam sasarannya supaya Panja lah ya kan. Panja, sehingga kita nanti lebih komprehensif melihat seperti apa si perjalanan riset yang sudah dilakukan mendukung adanya riset, tapi kan riset ini sebagaimana sudah kita diskusikan sebelumnya riset ini harus ada *cost and benefit* nya seperti apa gitu, manfaatnya apa gitu kan. Jangan-jangan itu nanti riset tapi tindak lanjutnya cuma sekedar bangunannya yang bagus tapi tidak memberikan manfaat atau jadi hanya sekedar mercusuar saja tapi tidak ada efek sosialnya. Saya setuju lembaga riset ini juga fungsinya mencerdaskan kaum intelektual pada peneliti. Saya minta juga nanti supaya ada pencerahan, saya minta juga nanti ada orang apa sumber daya akademik yang diminta belajar ke sana ya kan. Supaya dia juga ya terkait dengan soal peningkatan kapasitas sains dan juga teknologi, sehingga dampak dari pada manfaat lembaga riset terkait dengan baik di Morotai maupun di Pangandaran itu lebih banyak manfaatnya gitu kan. Seperti yang ditanyakan Ketua tadi, ini manfaatnya untuk apa? Begitu kan, kalau hanya seperti menara gading, memang saya pikir tidak ada manfaatnya gitu loh. Jadi itu harus terbuka ya kan, harus terbuka untuk masyarakat akademik. Demikian Pak Ketua.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Pak Panggah, monggo.

F-PG (Ir. PANGGAH SUSANTO, M.M.):

Terima kasih Pimpinan, rekan-rekan dari Eselon I.

pertama, kami soroti soal dualisme atau disbyut kewenangan di dua Kementerian, KKP dan LHK saya kira ini harus segera diselesaikan kalau nggak nanti terkatung-katung ini kasihan *stakeholder* yang terlibat di situ. Nah, dan masyarakat kewenangan ini kalau diserahkan ke kedua Kementerian ini suruh berunding saya yakin tidak selesai-selesai itu pengalamannya. Jadi menurut

saya Komisi IV kalau bisa memberikan keputusan, apakah benar apakah engga ini Komisi IV memberikan keputusan. Mau diberikan kewenangan ke siapa Pak? kalau suruh berunding itu pengalaman saya itu tidak sampai tahun dan nggak akan bisa. Begitu nanti argumen nganu dasar hukum, dua-duanya punya dasar hukum LHK punya, KKP punya, nah ini Pak saya pikir kalau memang memungkinkan Komisi IV memberikan keputusan, ya Komisi IV saja yang memutuskan. Ya harusnya Presiden sih cuma nggak tahu ini ya. Dan pertimbangannya menurut saya siapa yang paling siap gitu saja ya, siapa yang paling siap? Jadi jangan saya dulu pernah melepas kewenangan soal garam ke KKP, ya silakan *monggo*. Padahal kalau diurut adu argumen Undang-Undang dua-duanya ada. Terus saya ngelepas soal kayu lapis dan *barecore* ke KLHK, ya silakan tapi nggak diurus Pak, terus terang saja itu kemarin yang itu apa. Saya RDP saya tanyakan soal berkori di Temanggung, Wonosobo nggak diurus Pak, itu yang susah, kalau sudah diserahkan terus nggak diurus, yang penting ini diurus, siapa yang paling siap itu kasih saja. Karena kalau argumen aturan semuanya punya dasar, kasihkan saja. Kemudian kita ikut mengawasi ya karena memang soal pengawasan ini yang paling pokok dan soal kesiapan melaksanakan. Nah kalau saya lihat tirik-tiriknya ini kan kayaknya si KKP lebih siap ini dan bukannya melarang sebenarnya KKP ini hanya disiapkan dulu oleh segala sesuatunya baru kebijakan itu dikeluarkan. Nah biasanya kita menetapkan kebijakan tetapi tidak disiapkan infrastrukturnya ini sudah umum ini. Melarang tetapi tidak ada kelanjutannya dari kebijakan pelarangan itu. Itu mungkin soal kewenangan yang di wujud kewenangan.

Soal yang kedua adalah soal program riset ini Pak. program riset ini memang saya merasakan hasil-hasil riset ini belum bisa dirasakan manfaatnya secara nyata. Ya ini beberapa sudah tapi secara umum hasil-hasil riset baik lembaga-lembaga riset atau litbang di Kementerian maupun di LIPI, BPPT terus terang saja saya sebagai juga yang merasakan ini tidak terasa adanya apa itu dampaknya gitu ya dari riset-riset yang dilakukan. Apa sebabnya saya kurang tahu ya, tapi kelihatannya memang riset dan teknologi ini kan memang otaknya dari suatu pengembangan industri katakanlah demikian ya. Lah ini memang berkembang di masyarakat yang umumnya adalah sadar atau apa ya, sikap dan pola lakunya itu terhadap ilmu itu sudah sadar kira-kira gitu ya. Lah di kita ini kan kelihatannya belum perkembangan ini soal kesadaran apa pola laku ilmu di dalam masyarakat. Sehingga pada umumnya memang tidak berkembang di Negara kita sendiri, sains dan teknologi. Padahal ini penting, seperti kelautan itu kan sesuatu yang khas kita mesti lahir dari hasil sains dan teknologi yang tumbuh atau berasal dari Negara kita. Tapi memang pada umumnya memang belum bisa, umumnya kita masih mengimpor preskripsi teknologi dari luar ya. Preskripsi teknologi ini lahir juga dari latar belakang di mana preskripsi teknologi itu berasal. Nah umumnya harusnya BPPT ini yang mengkaji, apakah ini cocok dengan kondisi kita? Tapi saya sendiri selama 35 tahun tidak pernah mendapat rekomendasi dari BPPT ini lho teknologi-teknologi yang diimpor, ini yang perlu, dan penyesuaiannya seperti ini, itu kelihatannya belum bisa Pak. Nah ini saya si mendukung saja Pak dari KKP ini untuk riset ini karena ini penting sekali ya cuma harus jelas pak ini di mana keuntungan kita ya. Ini kan kalau ingin menumbuhkan iklim riset juga bagus kalau memang kita kemudian bekerjasama dengan berbagai negara ini. Tapi juga jangan sampai hasil-hasilnya itu justru mereka yang memanfaatkan karena kelemahan dari SDM kita, SDM riset kita sehingga mereka yang mendapat keuntungannya dari berbagai hasil riset dari preskripsian

yang dilahirkan dari riset tersebut. Ini yang kita ingin tahu Pak, Pak Sarif. Jadi mohon di mana kita bisa kuat untuk bisa bahwa preskripsi itu betul-betul milik kita ya.

Singapura itu mengundang apa riset dari seluruh dunia karena memang keterbatasan SDM di Singapura itu sendiri. Tetapi Negara bisa melindungi preskripsi itu tetap patennya milik Singapura. Nah dalam hal ini bagaimana gambarannya kira-kira supaya kerja sama dengan berbagai Negara itu baik, tetapi tetap itu milik kita bukan milik mereka dan pemanfaatannya juga untuk kepentingan kita.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait dua hal yang dibahas pada siang hari ini.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terima kasih, selanjutnya Pak Firman.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pimpinan yang saya hormati,

Mungkin saya tidak banyak karena tadi ada beberapa substansi yang sudah disampaikan Pak Darori. Terima kasih Pak Darori karena Pak Darori mengingatkan Undang-Undang tadi karena kebetulan waktu itu saya jadi Ketua Panjanya. Dan yang kedua mengenai posisi kedudukan dari pada lembaga riset tadi, adinda saya juga sudah menyampaikan. Mungkin fokus Pak kepada yang terkait dengan masalah potensi dari pada sumber daya alam. Tentunya kita harus menyadari bahwa konstitusi kita itu jelas mengamanatkan bahwa sumber daya alam dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Namun tentunya disitu bagaimana cara mengelola untuk kemakmuran rakyat? Oleh karena itu sumber daya alam harus dikelola dari dua aspek yang penting adalah secara ekonomis dan secara ekologis. Nah di situ lah pentingnya lembaga riset masuk. Nah bagaimana supaya potensi sumber daya alam ini sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sehingga teknologi-teknologi yang tepat guna dan hasil riset yang dilakukan oleh lembaga riset ini diaplikasikan. Nah ini yang sering-sering, mohon maaf dari LIPI juga kami sampaikan kami ini pada waktu memimpin Komisi IV yang lalu, dapat keluh kesah daripada peneliti kita. Peneliti kita ini kenapa pada kabur ke luar negeri, karena tidak mendapatkan tempat di Negerinya sendiri. Hasil penelitian mereka tidak dihargai di Negeranya sendiri. Gaji peneliti itu rendah sekali dibandingkan peneliti di luar negeri. Pada waktu saya studi banding di China, di Amerika dan di negara-negara lain, itu yang namanya peneliti profesor doktor semua di lapangan. Termasuk peneliti di DPR ini, peneliti di DPR ini kan setiap hari hanya menciptakan buku saja untuk meningkatkan *ranking* supaya dia masuk *grade* tapi tidak meneliti apa yang menjadi problem masalah yang ada di DPR ini sehingga munculah sekarang ini

kenapa kita membuat yang namanya *omnibus law*, karena Undang-undang kita nggak karu-karuan.

Oleh karena itu Pak, kembali lagi kepada terumbu karang Pak, mungkin perlu Pak, satu penelitian, perlu suatu kajian yang mendalam Pak, bagaimana supaya konservasi-konservasi ini juga dikelola juga secara ekonomis. Hampir semua Pak konservasi apakah ini gambut, apakah ini satwa yang dilindungi, apakah ini juga terumbu karang, ini kan selalu di Pemerintah yang saya lihat. Ini harus dikuasai sebesar-besarnya oleh Pemerintah tetapi kita lupa untuk membiayai untuk merawat dari pada konservasi perlu anggaran yang besar. Kenapa tidak kita kelola untuk menuju aspek yang dua tadi ekonomi dan ekologis. Kenapa tidak kita libatkan suatu regulasi supaya investasi masuk di situ tetapi lebih baik katakanlah ada konservasi terumbu karang 1 juta hektare, 700 hektare itu dilestarikan, 300 hektare dikelola secara ekonomis. Yang mengelola tanggung jawab untuk mengelola yang 700 hektar untuk dilindungi. Nah mungkin pola-pola ini Pak yang harus kita lakukan. Contoh sederhana Pak Wiratno, ini kan saya kemarin jalan-jalan di Mangga Dua Pak, karena melihat di TV One burung yang indah-indah diimpor, dijadikan komoditi ekspor untuk menggali devisa dari luar negeri. Ada kakak tua hijau, kuning, biru dan sebagainya. Kalau kita kan semuanya dilarang, tetapi kita tidak bisa berbuat apa-apa, karena kita tidak mampu mengamankan satwa-satwa yang kita lindungi dengan sedemikian rupa ditengah hutan karena kita tidak cukup daya dukungnya baik keuangannya, tenaganya, dan daya dukung lainnya. Mereka sekarang Pak, membudidayakan itu untuk menjadi devisa negara, kenapa nggak kita lakukan? Contohnya di sebelah kanan saya ini tadi saya ngomong, jalak putih Bali, jalak Bali. Dulu kan sudah hampir punah, sekarang sudah luar biasa dan kemudian jadi kembangbiakkan lagi di alam semesta tapi pengelola sekarang dari nilai ekonomisnya sudah bisa diperjual belikan. Saya kemarin juga Pak mengunjungi salah satu tempat, ada seorang marinir yang membawa merak dari Papua, sekarang dia dibudidayakan Pak, dan telurnya itu bisa beranak dan kemudian dijual, jual, jual itu nilai ekonominya menurut saya luar biasa tapi regulasinya belum ada. Yang ada hanya menangkap, menangkap, menangkap dan menangkap. Nah mohon ini lah yang mungkin perlu jadi terobosan ke depan bagaimana sumber daya alam ini bisa dikelola untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dikelola dari aspek ekonomi dan pelestariannya, ini satu.

Dan kedua mengenai tadi Pak, Piamari dan Miamari. Saya ini belum tahu istilah ini Pak, Pak Sarif karena saya baru menyesuaikan lagi ini, frekuensi di Komisi IV. Mungkin yang disampaikan tadi sudah melalui perencanaan yang sangat matang ya, tidak mungkin satu pemerintahan membuat suatu keputusan yang tidak ada kajiannya. Tentunya kajian-kajian ini berdasarkan aspek yang namanya geografis, aspek teknis, dan kemudian aspek-aspek lainnya. Oleh karena itu kami memberikan apresiasi perencanaannya yang sudah hampir final. Mungkin Pak Ketua, Pak Pimpinan, karena teman-teman ini kan semua baru termasuk saya juga baru masuk di sini lagi, mungkin perlu mengadakan suatu kunjungan spesifik untuk melihat secara langsung, dijelaskan secara langsung. Kalau saya lihat tadi di sana tu tidak semata-mata menjadi sasaran objek wisatanya. Wisatanya itu sesungguhnya adalah suplemennya, tetapi tujuan utamanya adalah untuk memenuhi kebutuhan penelitian dan tadi mengatasi bagaimana supayaantisipasi gempa bumi dan sebagainya tidak terjadi, di situ. Oleh karena itu aspek geografis sangat menentukan, tidak bisa kemudian tiba-

tiba ditaruh di pantai utara di kampung saya di Pati, kan ngga mungkin. Nah ini tentunya dihormati terhadap kajian-kajian yang strategis yang dilakukan oleh Kementerian.

Mungkin yang dipertanyakan Pak Sarif, karena kebetulan Menteriya dulu dari sana, kenapa di Pangandaran, gitu kan? Apakah tidak ada tempat lain? Kan kultur DPR kan begitu, kenapa di situ? Nah ini ya mohon ya mungkin satu penjelasan, tapi tadi sudah cukup dijelaskan dari argumentasinya saya sebagai orang awam sangat bisa menerima karena ada aspek teknis, ada aspek geografis, dan mungkin juga ada persyaratan-persyaratan yang kami belum tahu. Jadi oleh karena itu usulan kami Ketua, mungkin perlu kita kunjungan spesifik kalau nanti dalam kunjungan spesifik itu toh ada ketidakpuasan, kita bisa membentuk Panja untuk mendalami dan kemudian meyakinkan kembali langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Ini mungkin hal-hal yang perlu kita lakukan khususnya KKP mengenai kembali ke riset. Pak Sarif mungkin saya mengusulkan ya, penerjemahan dari pada ekonomi ekonomi kreatif, itu tidak dikonotasi.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Waktu Pak Firman.

F-PG (FIRMAN SOEBAGYO, S.E., M.H.):

Ya, sedikit lagi Pak. Tidak dikonotasikan hanya untuk teknologi modern saja. Tetapi seperti lobster Pak, lobster itu kan sebetulnya bisa dibudidayakan Pak. Ketika budi daya masuk masyarakat, itu bisa membawa dampak nilai ekonomi, Pemerintah tinggal membikin regulasinya, memperkuat. Oleh karena ini Pak mungkin ini yang menjadi terobosan sehingga dari aspek ekonomi bisa dikembangkan dan kemudian dari aspek-aspek lainnya, ekologiannya harus ada manajemen. Demikian.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Pak Suhardi Duka? Spesialis koral ini.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

**Pimpinan, Anggota Dewan yang terhormat, dan
Kepada Pejabat Eselon I di KKP dan KLHK**

Kita pahami bahwa, sumber daya kelautan kita sangat kaya sekali dan seluruh potensinya belum seluruhnya kita tah. Olehnya itu kita butuh riset dan memang pemahaman kita terhadap hasil penelitian tidak bisa seperti kita menangkap ikan langsung bisa dibakar, atau dimanfaatkan, atau dijual. Hasil

penelitian selalu jangka panjang dan selalu perlu tindak lanjut yang lebih terencana dengan baik. Oleh karena itu saya cukup memberikan dukungan kepada KKP untuk mengadakan suatu Badan Pusat untuk riset Miamari ini. Mengenai lokasinya ya tentu kita perdebatkan, tetapi tujuannya untuk riset dan pemanfaatan untuk pengetahuan saya kira perlu berikan *support*.

Yang kedua, antara kepentingan ekonomi dan lingkungan tentu kita selalu sejalan, tidak boleh salah satunya kita korbakan. Dan itu juga mungkin amanah SDGs *Sustainable Development Goals*. Terhadap koral, saya kira lengkap sekali pengetahuan yang diberikan kepada kita baik oleh Dirjen maupun oleh KLHK dan LIPI. Saya ingin menitikberatkan bahwa pengambilan koral dari sekian yang ada itu, kurang dari 10%. Yang paling banyak merusak koral adalah bukan pengambilannya, yang paling banyak merusak adalah bom ikan, itu yang merusak terumbu karang, bus ikan, itu yang paling banyak merusak. Pengambilan koral ini hati-hati orang Pak, nelayan itu hati-hati karena apa, karena nilainya tinggi kemudian juga harus diambil hidup dan dijual hidup. Jadi kalau dirusak nggak bisa, dia mati. Jadi tingkat kerusakan terumbu karang terhadap koral ini saya menilai sangat kecil dan apa yang dikatakan tadi oleh Ansi Lema, saya kira benar adanya bahwa antara terumbu karang dengan koral beda.

Dari data yang ada bahwa termasuk Sulawesi Barat kurang lebih 500 orang mungkin lebih Pak, yang memanfaatkan koral ini. Kalau yang lalu mereka itu sebelum pelarangan, mereka bisa beli motor karena satu koral yang harganya nilai tinggi itu, katakanlah yang nama donat itu ya, itu dihargai dengan sampai 200 ribu, jadi satu biji diambil dia sudah bisa menghidupi keluarganya dalam satu hari. Saat ini mereka meninggalkan karena tidak dibeli dan anjlok harga ya, sisa tinggal 20 ribu. Jadi ini yang menjadi persoalan kita jadi kenapa saya dorong karena ini yang diminta oleh masyarakat kepada saya. Pertanyaannya adalah apakah dengan dilarang atau tidak diberikan sertifikat ekspor, eksportirnya berhenti? Jawabannya tidak, jalan terus eksportirnya. Kalau begitu bagaimana? Artinya diselundupkan atau terjadi *kongkalikong* antara petugas dan mungkin ada oknum tertentu yang *membacking* sehingga di lembaga karantina tetap lolos. Nah ini, saya tahu orangnya, padahal lembaganya tapi nggak bisa disebut lah, ya tidak enak. Olehnya itu saya meminta kepada kita semua, berikanlah kesempatan kepada rakyat untuk menikmati sumber daya alam kita ini. Sekitar 12 ribu dari apa namanya, dari dampak penghentian ini yang korban berikan kesempatan saya memberikan dukungan kepada KKP untuk melarang pengambilan koral di area konservasi. Tetapi untuk alam di wilayah tertentu saya kira kita kasih kebijakan, sehingga masyarakat kita dan juga pendapatan devisa kita dan bisa kembali Indonesia menguasai yang selama ini diambil oleh Australia. Satu sisi dari sisi ekonomi, sehingga itu lah sehingga saya berharap bahwa jangan sampai kemarin Ibu Susi ada mungkin eksportirnya yang dia tidak suka sehingga dia ya, akhirnya korban masyarakat. Saya tidak tahu eksportirnya, saya tidak tahu, siapa eksportirnya saya tidak tahu, yang saya tahu adalah masyarakat menitipkan kepada saya bagaimana ini. Sebenarnya ada dua, ada dari satu lola, lola iya, lola sekarang itu masih dianggap masyarakat bahwa lola ini dilarang yang laut dalam Pak, yang agak besar itu, ya? Kima ya, iya, itu yang besar.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Bahasa perikanan kima, bahasa pojok kampung lola pak.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Beda ya? Kima ya, ya itu. Itu yang dia titip masyarakat kepada saya. Saya kira sekali lagi kepada Pimpinan minta ini supaya ini dibijaksanai pada KKP.

Terima kasih.

Wallahul Muwaffiq ila Aqwamit Tharieq Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Walaikumsalam

Pak Edward, PKB NTT ya?

F-PKB (EDWARD TANNUR, S.H.):

Iya, terima kasih banyak Pimpinan.

Dari Dirjen Dirjen dari KKP dan KLHK, jadi saya ambil kesimpulan saja, saya juga sudah terlalu banyak dengar telinga sudah tidak tampung lagi. Jadi saya ngomong singkat *point* saja, kedengarannya memang aneh tetapi nyata jadi begini pertama kita harus selesaikan itu pembuatan aturannya harus tuntas dulu kalau aturan tidak tuntas ini tuduh sapi-sapi (suara tidak jelas) pusing sehingga tidak terkesan tumpang tindih kewenangan itu, itu harus dibereskan dulu.

Yang kedua, pada saat kita lakukan ekspor terhadap pengambilan hasil alam ini kita harus menjaga ekosistem karena ini kan berkelanjutan untuk anak cucu kita. Duit kita bisa cari tapi kalau ekosistem rusak perbaikannya bukan sedikit dan saya maksudnya petakanya itu anak cucu kita jangan main-main ya. Kebetulan kita lagi menjabat jadi kita anggap kejar target tapi target yang tidak kelihatan kan kita tidak tahu. Jadi itu perlu kita jaga. Jadi eksploitasi koral laut itu juga harus ada batasannya siapa yang menjaga batasannya? Kalau nelayannya kan tidak tahu, mau 50% atau 100% batasannya dimana, 20% nya dimana, dia nggak tahu, dia bukan orang ilmunan atau apa 10%. Jadi ini harus ada pengawasan, pengawasan yang melekat. Ya kalau mau pengawasan ya Kepala Daerah Kepala Daerah itu dilibatkan, mereka diberi pemahaman tentang koral, daripada hanya dia ngomong doang tetapi tidak mengerti tentang apa itu koral, apa itu terumbu karang. Saya juga masuk DPR baru saya tahu, oh koral yang ini. Jadi saya belum paham, jadi Bapak menjelaskan saya terima kasih sekali, supaya saya pulang ke Dapil saya seperti orang bodoh. Ini koral, ini terumbu karang jadi terumbu karang jangan dibuat rusak. Kamu ambil saja ini apanya koralnya saja sehingga nilai tambah tetapi menjaga ekosistem. Ini sosialisasinya yang kurang sosialisasinya. Mereka kan di satu sisi mau supaya ada pendapatan supaya bisa hidup bertahan hidup, tapi bukan ngawur harus ada aturannya jadi pengawasannya juga sudah mengenai survei atau penelitian tentang aquarium saya senang.

Jadi baik setelah saya mendengar bahwa di NTT itu suhu lautnya beda tinggi sekali 50° dengan – 5° pada kedalaman 100 meter, ini kan potensi yang sangat bagus. NTT itu daerah miskin, jadi kalau dia punya potensi coba kita fokuskan kembangkan coba energi di NTT. Memang banyak peluang dan banyak kekayaan, banyak potensi tetapi coba kita fokus satu-satu dulu. Indonesia ini hutang banyak, jadi jangan sampai kita bayar tidak bisa kita buat anak cucu yang tanggung. Saya kira ngomongnya tidak banyak, hal itu saja. Jadi terima kasih banyak, banyak pengetahuan yang saya dapat setelah saya berada di Jakarta. Kita ini orang kampung jadi Bapak Ibu tahu *toh*? Jadi ini merupakan masukan yang berharga. Jadi pulang saya, kalau kami berbicara kami punya orang di kampung, mereka paham. Karena bahasanya bahasa ibu, kalau kita memakai bahasa Indonesia mereka kurang mengerti. Jadi ini ngomong apa lagi ini Bapak. Jadi saya terima kasih banyak Pimpinan, hanya ini saja.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terima kasih, baru tahu hari ini koral ya Pak Edwar. Ustadz Slamet?

F-PKS (drh. SLAMET):

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Terima kasih.

**Pimpinan dan rekan-rekan Anggota Komisi IV yang saya hormati,
Dan Eselon I dari beberapa Kementerian yang hadir hari ini.**

Nampaknya juga hampir senada dengan beberapa rekan-rekan yang lain. Yang pertama saya menyoroti tentang Piamari dan Miamari. Jadi ini program sudah berjalan tentunya nanti akan bisa terevaluasi. Dampak secara langsung khususnya kepada masyarakat kita, rakyat kita, *wabil* khusus adalah para nelayan kita. Karena kalau kita lihat Kementerian ini sudah ada lama juga tetapi nasib dari rakyat kita atau masyarakat kita yang ada di nelayan juga belum juga beranjak dari kemiskinan. Sehingga bagaimana nanti kita akan ukur dampak dari program atau proyek ini mudah-mudahan kita berharap sesuai dengan skenario program awal tetapi kalau tidak kita tentunya akan meminta pertanggung-jawaban. Tentunya dalam waktu dekat tadi disampaikan oleh Pak Firman yang terhormat ini menjadi konsen kita sebagai sebuah tugas pengawasan itu lebih kepada hanya untuk mencocokkan antara anggaran dan realisasi kira-kira cocok apa nggak. Tapi lebih dari itu tentunya ada harapan besar akan berkaitan langsung dengan kemanfaatan kenaikan atau terangkatnya kemiskinan dari itu, ini adalah hal real yang harus kita.

Yang kedua, tentunya sama juga semangat yang sudah digulirkan oleh Presiden adalah bagaimana kemudian *omnibus law* ini berjalan dengan baik. Tumpang tindih dari seluruh aturan ini segera diratifikasi, dan Kementerian ini kalau kita lihat kemarin ketika kita raker dengan Menteri sudah menjanjikan, aturan-aturan yang kemudian akan disinkronkan sehingga tidak tumpang tindih lagi, sehingga langkah ini sudah sampai dimana? Ini tarik menarik apa pengambil kebijakan ini yang seperti ini, KKP memberikan solusi bahwa sebaiknya

efektivitasnya pengelolaan ini ada di KKP. Nah, sementara aturannya masih ada itu sehingga harus segera kira-kira kapan itu akan dilakukan sinkronisasi atau ditarik bagaimana? Saya pikir tadi betul Komisi IV harus hadir sekaligus juga ikut mengarahkan ini sebaiknya di sini. Jadi supaya ini tidak ada tarik menarik yang lebih itu lagi, sehingga iklim investasi juga berjalan dengan baik tidak ada ego sektoral yang kemudian ada dalam masing-masing itu. Itu mungkin beberapa hal terkait dengan itu jadi catatan saya. Mungkin peraturan-peraturan mana sih yang kemarin dijanjikan oleh Menteri untuk yang akan kemudian yang disinkronisasi atau digabungkan untuk kemudian itu, karena dampak dari ini sudah bisa kita evaluasi. Lima tahun kemarin banyak pelarangan-pelarangan dan dampaknya tidak membawa sebuah kebaikan untuk rakyat kita yang langsung berinteraksi yaitu nelayan. Sehingga dengan sudah berjalan lima tahun sebaiknya segera dilakukan perubahan-perubahan dan kita akan awasi itu.

Itu saja Pimpinan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Sebagaimana kita sepakat tadi rapat berakhir 13.30, ya akan bijak 2,5 menit untuk Ibu Luluk dan Pak Krisantus. Silakan karena dua penanya. Pak H.T.A Khalid setelah dzuhur nanti ya?

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Iya, terima kasih Pimpinan juga Bapak Ibu sekalian dari KKP.

Yang pertama yang terkait dengan koral, jadi sesuai dengan data yang saya baca bahwa sumbangan koral untuk ekspor kalau nggak salah 10,7 juta US dollar. Sebenarnya kalau ini dibandingkan dengan produk perikanan dan kelautan yang lagi ini kan jauh sekali bandingannya. Yang lain sudah sekian miliar US dollar dan kemudian untuk koralnya itu hanya 10,7. Tetapi di sisi lain juga ada data dan fakta yang disajikan terlepas nanti itu data bisa juga dicrosscheck lagi dengan sumber-sumber yang lain bahwa kondisi ada dua kan, terumbu karang dan juga koral. Jadi kalau kondisi terumbu karang kerusakannya dan juga koral sebenarnya itu yang baik itu nggak sampai 50%. Jadi kalau kondisi yang sehat, yang baik, yang berkualitas artinya kalau orang tubuh itu yang seger waras, bugar itu tidak sampai 50% dan itu menurut saya juga suatu kondisi yang mengkhawatirkan karena apa? Karena ini akan terkait langsung juga dengan produktifitas juga kesehatan dari produk perikanan yang lain. Kalau misalnya kita punya *concern* tentang kesejahteraan nelayan misalnya ya, maka produktivitas nelayan dan hasil tangkap yang dilakukan oleh nelayan itu juga sangat dipengaruhi oleh seberapa sehat berkualitasnya terumbu karang itu. Jadi ini dua hal yang tidak bisa dilepaskan satu sisi. Sampai kemudian ada juga pikiran kalau misalnya ada satu langkah yang sangat serius menghentikan ekspor koral dengan kerugian itu tadi misalnya 10,7 tetapi kita menyelamatkan triliunan yang lain maka mana sebenarnya itu yang kemudian *benefits* untuk masa depan dan hari ini? Nah baru kemudian Pemerintah harus memikirkan memang mengganti

kalau tidak salah kan pelaku yang terkait langsung dengan koral ini sekitar 7000-an sekian kayak begitu. Kita tidak mengecilkan 7000 nelayan, tetapi ini juga sebenarnya karena ada pemberdayaan dan juga pelibatan yang selama ini tidak cukup mampu untuk juga mensejahterakan. Jadi kalau ngomong kesejahteraan tetapi kok tidak *se-worthed enough* gitu lho Pak, ini pertanyaan.

Nah justru yang kemudian saya juga ingin tanyakan apakah misalkan 10,7 itu yang tercatat atautkah sebenarnya yang nggak tercatat, yang nggak dilaporkan itu sebenarnya lebih banyak lagi, kenapa? Dilihat dari kerusakan yang sebegitu parah, kemudian 70% juga Indonesia itu sebenarnya penguasa yang koral dunia tetapi kok kemudian nilai ekspornya segitu? Memang budidayanya yang kecil atau eksploitasinya yang kecil atau kah sebenarnya pencuriannya yang lebih besar? Nah termasuk kemudian apakah ada kemungkinan pencurian koral itu dilakukan oleh kapal-kapal asing? Itu yang kita juga belum dengar itu, jangan-jangan kapal asing itu tidak hanya mencuri ikan tetapi sebenarnya mencuri koral dan juga termasuk merusak terumbu karang. Seperti yang pernah kejadian di Papua Barat waktu itu kapal pesiar merusak yang dibilang bahwa, untuk menyembuhkannya saja itu butuh waktu bukan hanya puluhan tapi bisa seratus tahun. Nah itu apa yang kemudian sanksi yang diberikan ke mereka? Berapa sih nilainya yang kemudian mereka harus berikan untuk bisa menyembuhkan terumbu yang rusak hingga 100 tahun yang itu nggak bisa dibenarin.

Nah kemudian yang kedua, yang terkait dengan riset Pak, sebenarnya untuk melihat sekilas tadi itu, saya ini orangnya sebenarnya *open minded*, itu keren sebagai negara yang memang maritim gitu ya, nenek moyang pun seorang pelaut tetapi kemudian tidak ada artefak dan jejak-jejak yang *scientist* yang itu memang akan menjadi warisan baik sekarang ataupun yang akan datang. Tetapi bagaimana bisa kita bisa menjawab bahwa ide baik saja tidak cukup, kemudian proyek baik tidak cukup, *political will* itu sudah ada tetapi kemudian memastikan bahwa ini tidak akan mengulang kisah-kisah lain yang itu tadi menjadi proyek gitu lho yang mangkrak. Yang Hambalang itu masih menjadi traumatis buat semua orang. Nah ini yang bisa dilakukan memang saya setuju ya misalnya ada P anja dan juga kunjungan kesana sehingga kita bisa sampaikan ke publik. *Nuwun sewu* lagi lagi saya *test* di media sosial ternyata nggak ada yang ngerti ini. Mungkin yang kuper itu kami dan juga teman-teman yang di medsos, Miamari itu apa Piamari. Nah ini jangan-jangan juga komunikasi publik itu kurang sehingga dukungan tidak ada nah *ujug-ujug* itu jadi. Nah ini yang berbahaya sebenarnya di situ karena ini melibatkan uang ratusan miliar yang ini uang itu kan harus dipertanggungjawabkan.

Saya kira itu Bapak *point* pentingnya. Jadi mohon nanti ada respon ya antara niat memelihara ekosistem laut tapi kemudian ada nilai ekonomi tapi kok menurut saya kok kecil? Nah kayak begitu. Di sisi lain ada pemberdayaan nelayan yang harus juga dilibatkan, nah bagaimana bisa mengantisipasi itu? Dan terakhir Pak Ketua sebentar soal bagaimana kemudian KKP juga mengantisipasi dengan adanya amanat Undang-Undang tentang Badan Karantina. Jadi nanti itu kan akan ada *single* Badan Karantina, nah kalau masih kepecah-pecah ada karantina perairan sendiri, karantina tanaman sendiri, dan lain-lain sebagainya apakah sudah mau didorong menuju *single* Badan Karantina itu? Karena itu menjaga gawang kita yang sangat serius untuk baik itu ekspor maupun impor.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terima kasih, Pak Krisantus, terakhir, silakan.

F-PDIP (KRISANTUS KURNIAWAN, S.IP., M.Si.):

Terima kasih.

Kalau saya lihat pembicaraan teman-teman terdahulu, nampaknya tidak ada yang bijak ini Pak Ketua. Lewat semua waktunya, mudah-mudahan saya bisa bijak. Baik, saya Krisantus Kurniawan Dapil II Kalbar, kami tidak ada laut dan saya sama dengan kawan tadi ini depan kursi di depan saya ini, nggak ngerti. Yang saya tahu, koral itu di sana untuk bangun jalan ya. Jadi koral yang dibicarakan pada raker pada hari ini saya bingung begitu, karena tidak ada laut dan kami tidak ada terumbu karang dan sebagainya. Tetapi saya apresiasi apa yang disampaikan oleh teman-teman, apa lagi saya lihat kawan-kawan di Komisi IV yang daerahnya memang berada di tepi laut mereka memiliki pemahaman yang komprehensif terhadap koral dan terumbu karang. Tentu masukan-masukan teman-teman ini, harapan saya bisa ditindaklanjuti. Karena apa? Saya baru di DPR, di DPR RI maksudnya baru tetapi kalau di DPR yang ada D nya sudah 20 tahun. Pengalaman saya di D itu rapat-rapat seperti ini hanya budaya Pak budaya tapi endingnya entah kapan jadi tidak tahu. Mudah-mudahan di DPR RI ini karena ini DPR yang paling tinggi setahu saya tidak ada DPR dunia. DPR yang paling tinggi tentu pembicaraan kita rapat kita bisa dipegang. Karena apa, setiap habis rapat saya lihat saya perhatikan Pak mulai dari kita Komisi IV pertama rapat. Pimpinan menyimpulkan setelah disimpulkan langsung ketuk palu, setuju Pak Menteri? Setuju. Setuju teman-teman Komisi IV? Setuju. Harapan saya inkrah itu. Karena apa? Karena tadi saya bisik-bisik dengan Pak Dir di dekat saya ini, mantan Direktur Jenderal di samping saya. Dia mengatakan bahwa rapat yang topiknya dilaksanakan pada hari ini, sudah dilakukan pada masa Ibu Susi dulu dan pada waktu itu berkomitmen akan menindaklanjuti. Tetapi rupanya sampai dengan hari ini belum ditindaklanjuti.

Nah harapan saya Pak Pimpinan, rapat kita pada hari ini dengan kehadiran kami yang minim pengetahuan terhadap koral dan terumbu karang ditindaklanjuti apa yang disampaikan teman-teman termasuk kunjungan spesifik tadi. Mau lihat apa tadi segala aquarium ya? Bagaimana kawan-kawan setuju kan? Supaya apa? Supaya apa yang Komisi IV sampaikan dan Kementerian KKP tanggap betul-betul bisa dipegang begitu Pak. Jangan hanya kita rapat-rapat menghabiskan waktu percuma ini sudah jam berapa ini jam setengah 2 dari pagi. Mungkin kita bisa kegiatan lain dari pada rapat tidak ada gunanya, kan begitu Pimpinan. Jadi periode ini harus greget maksud saya, betul-betul ada sesuatu yang kita hasilkan. Saya pikir itu saja Pimpinan, saya hanya memberi saran agar kita betul-betul sakti pada periode ini.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terima kasih.

Ini Pak Ketua sebelah saya ini ingin memberikan komentar atau saran dan pendapat, jangan disimpulkan dulu Pak, karena belum dijawab oleh beliau, silakan Pak satu menit setengah.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik.

Koral, kita selalu melihat kalau dari sisi pelarangan kerugian ekonomi yang ditimbulkan tembus angka 500 miliar. Coba Kementerian juga membuat riset keuntungan apa yang ditimbulkan dari pelarangan itu, sehingga kita bisa mengkompare lebih baik mana dilarang atau diizinkan? Dilarang rugi 500 miliar, kemudian untung berapa triliun? Dalam bentuk apa konsensi keuntungannya? Sehingga kepala kita ini tidak terus menerus pikirannya adalah keuntungan, keuntungan, keuntungan, yang pertama.

Yang kedua adalah rakyat. Seringkali rakyat itu baik nelayan maupun petani tidak mendapat untung yang terlalu besar dari berbagai apapun, yang untung itu pedagang. Di pertanian pedagang, di rakyat juga dagang, nelayannya paling kebagian 15.000, 10.000 tidak seperti yang dipikirkan. Yang kemudian kalau konservasi lebih utama dibandingkan dengan ekonomi karena itu jangka panjang nelayan juga akan diuntungkan dalam jangka panjang saya pikir tidak ada problem konservasi kita pertahankan. Dan kita juga harus berpikir hidup ini bukan hanya untuk kita saja, untuk ke depan. Kemudian yang lembaga riset itu, di Pangandaran itu kalau dari sisi tingkat kunjungan berkunjung sebagai pariwisata karena kalau risetnya karena orang kita rendah. Itu sudah hampir tahun 2019 3,9 juta pengunjung artinya tingkat kunjungannya tinggi karena mungkin meletakkannya tepat. Jadi bukan liat risetnya, orang liat aquarium liat ikannya, kalau kita kan risetnya susah bangsa kita.

Nah terakhir, saya minta *supporting* riset tidak mesti harus dalam proyek riset Kementerian. Tetapi para peneliti siapapun yang dibidang biologi, kelautan, kehutanan, apapun dia, dia bekerja untuk riset, harus di *support* oleh kita semua.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terima kasih Bu Endang.

Akan bijak karena beliau juga manusia yang butuh sholat dan makan, kita sepakat sebagaimana kesepakatan awal Ketua membuka berakhir pada 13.30. Ini sudah diluar komitmen kita dan keputusan kita nanti kita buka kembali. Kita sepakat tadi, Pak Darori sudah makan enak dan sholat, kita skors 30 menit ya? Istirahat sholat makan, cukup kan?

(RAPAT: DISKORS)

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Walaupun memang tapi memang sudah hampir lebih setengah jam kan? Baik, karena setelah ini kita mesti ada rapat dengar pendapat dengan Dirjen Perkebunan, seluruh rangkaian pendapat, pernyataan, pertanyaan dari seluruh Anggota Komisi IV sudah selesai. Masih Tersisa? Silakan Bu, silakan.

F-GERINDRA (D. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI DESS, M.Sc.):

Baik, terima kasih Pak Ketua, Pak Dirjen, dan para sahabat semua.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jadi saya hanya tadi Pak tergelitik dengan pernyataan Pak Ketua juga bahwa manfaat dari riset ini sebetulnya untuk siapa? Karena tujuannya kita untuk kesejahteraan masyarakat kita.

Nah yang kedua Pak, sebetulnya koral ini kan ada 569 jenis ya Pak ya, dan di Indonesia ini baru 59 jenis yang dimanfaatkan. Nah saya mohon di Badan, eh sekarang Badan SDM ya Pak masuknya? Jadi di Badan Penelitian dan Pengembangan ini digali lagi kemanfaatannya tujuannya untuk mensejahterakan rakyat tentunya. Nah juga koral ini kan merupakan sumber daya alam yang terbaharukan juga, nah ini yang belum disosialisasikan kepada masyarakat luas sehingga perlu ada sosialisasi yang menyeluruh karena menyangkut peraturan dan Perundang-undangannya. kemudian juga pemanfaatan koral ini Pak yang saya lihat baru 0,0001% dari total populasi karang yang ada di Indonesia. Nah ini juga perlu kita evaluasi lagi.

Nah yang keempat, pemanfaatan koral budidaya merupakan hasil produk dari budidaya yang telah melalui mekanisme audit tentu saja. Nah di sini kan peranan Badan Karantina dan teman-teman di Badan Litbang Perikanan mempunyai peran penting bagaimana untuk mengevaluasi tentang jenis-jenis yang perlu diekspor dan yang perlu dilindungi.

Yang kelima, kompensasi dan kewajiban atas pemanfaatan koral alam tadi. Jadi mudah-mudahan dengan adanya RDP ini bisa menambah kesejahteraan nelayan-nelayan kita yang pengetahuannya sangat terbatas juga tentang ekosistem daripada koral ini.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik, terima kasih.

Selanjutnya, nggak usah lagi jawaban? Baik kata Pak Senior Ketua, jawabannya dihilangkan untuk memangkas waktu dan kita, boleh iya? Silakan, silakan.

**DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI,
S.T.):**

Baik, terima kasih.

Pimpinan, Anggota Komisi IV yang kami hormati

Masukan membangun yang sudah kami terima akan kami tindaklanjuti. Kami di KKP bahwa termasuk Kementerian yang paling berbahagia karena di hari ini kita sudah melihat ruang laut menjadikan ruang laut sebagai sumber daya. Tentunya Bapak *baseline* itu akan bisa didapatkan ketika kita punya kajian teknologi riset yang bagus. Kami harapkan apapun peraturannya, nilai-nilai penting ekosistem yaitu koral, *seagrass* atau padang lamun dan juga mangrove itu bisa selalu lestari. Karena sesuai dengan arahan juga dari SDG 14 utamanya (suara tidak jelas) target setidaknya punya 10% Pak, kawasan konservasi dari total kawasan perairan kita. Yang kita sudah punya baru 22,68 juta dari target 30 juta. Harapannya seperti kami sampaikan tadi Desember kita lakukan kajian untuk bisa memberikan keputusan yang paling arif, tetap menjaga lingkungan dan juga dikawal masing-masing oleh Kementerian/Lembaga bersama-sama memantau agar eksploitasi dan juga pengembangan tentang pembudidayaan koral ini bisa dilakukan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik, terima kasih.
Selanjutnya, masih? Silakan.

**KEPALA BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN
PERIKANAN (Prof. Ir. SJARIEF WIDJAJA, Ph.D., F.RINA.):**

Baik, terima kasih.

Yang saya hormati Bapak Pimpinan dan para Anggota

Jadi mohon izin, rekomendasi dari Pimpinan dan Anggota sepenuhnya kami akan tindak lanjuti dan kami jawab secara tertulis. Kami akan sangat gembira sekali bila Bapak-bapak Ibu sekalian berkenan untuk berkunjung secara kunker spesifik ke lokasi riset kita di Piamari maupun di Miamari dan disana akan kami jelaskan secara rinci program-program apa saja yang akan kita sampaikan melalui dua *research center* ini.

Bapak ini mohon izin, contoh saja sedikit saja Pak, contoh. Ini adalah output dari *reserach center* kita yang ada di Bali Pak, Jembrana. Kita punya stasiun bumi untuk menerima data satelit, data satelit itu masuk ke kami kemudian kita olah dan kita kerja sama dengan provider, telekomunikasi provider. Kita sebar Pak kepada semua nelayan Indonesia. Mereka akhirnya sekarang kalau mencari ikan tidak perlu lagi pakai *feeling*, pakai *local wisdom* tetapi mereka bisa melihat di android dia, koordinat mana ada lokasi ikan. Ini salah satu contoh riset kita

mulai dari teknologi tinggi menggunakan satelit digital, kemudian *mapping* Indonesia tahu lokasi klorofil dan lokasi ikan langsung kita *blast* ke semua nelayan melalui telekomunikasi. Ini contoh Pak. Jadi hal-hal yang sama akan kita lakukan untuk dua *reserach center* yang baru Piamari maupun Miamari.

Terima kasih Pak, saya rasa demikian.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik, terima kasih.

Seluruh jawaban-jawabannya sudah dijawab bagi yang hadir masih mendengarkan, selanjutnya kita sampai ke kesimpulan.

Kesimpulan dan keputusan:

Satu, Komisi IV DPR RI meminta Badan Riset dan Sumber Daya Kelautan, Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melaporkan *progress* perkembangan *progress integrated aquarium and marine research* atau institut Piamari di Pangandaran dan Morotai secara berkala. Selanjutnya dalam rangka menindaklanjuti Rapat Dengar Pendapat ini, Komisi IV DPR RI akan melakukan Kunjungan Spesifik dalam rangka melihat secara langsung *progress* pembangunan Piamari, ini setuju? Setuju? Ya.

(RAPAT: SETUJU)

Dua, Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk kembali memberikan pelayanan penerbitan sertifikat *health certificate* dalam rangka dalam peredaran atau perdagangan koral/karang hias baik yang berasal dari alam maupun transplantasi selambat-lambatnya pada akhir bulan November 2019. Untuk mendukung pencapaian target realisasi ekspor dalam rangka peningkatan devisa serta Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta untuk meningkatkan iklim usaha pemanfaatan peredaran perdagangan koral atau karang hias. Belum setuju? Silakan Bu.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.P.A.):

Bukan persoalan tidak setuju, tetapi memang menurut saya itu masuk akal gitu lho larangan seperti itu tetapi memang perlu ada kajian yang lebih komprehensif yang terkait tadi soal manfaat, soal tidak manfaat, soal aspek ekonomi tetapi juga aspek-aspek yang lain itu kan harus dihitung secara keseluruhan. Ada kearifan lokal itu dalam konteks kita ini apa sih yang kita bangun? Kata Pak Pimpinan tadi kan bukan hanya sekedar keuntungan yang ternyata nilainya juga segitu sebenarnya gitu ya. Saya masih kok menurut saya sih belum setuju kalau redaksinya seperti ini, gitu.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Silakan berpendapat, Ibu silakan, masih?

Atau kalimatnya adalah menyangkut kebijakan ini meminta Kementerian untuk melakukan pengkajian baik dari sisi keuntungan ekonomi maupun

keuntungan ekologi yang akan dibahas kemudian setelah pengkajiannya selesai, setuju nggak? Bapak bagaimana?

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Termasuk menambahkan kan kemungkinan tadi saya menyampaikan jangan-jangan sebenarnya juga ada modus pencurian yang itu dilakukan. Jadi kayak begitu itu masuk di dalam pengkajiannya begitu.

Terima kasih.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saya sedikit Pak Pimpinan.

Sebenarnya kita terlalu khawatir yang kita sendiri tidak tahu khawatirnya kita apa, iya, kita ketahui bahwa dari data yang ada kurang dari 10% bahkan ada yang mengatakan tadi itu hanya 0,000 sekian %, apanya yang rusak? Lingkungan kita tidak rusak dengan itu. Saya juga tidak akan setuju kalau lingkungan itu rusak, saya juga pecinta lingkungan. Hanya kalau kita berlarut-larut seperti ini yang korbannya itu adalah nelayan kita, di satu sisi koral ini ekspornya jalan terus, seandainya tidak jalan, oke stop stop betul, jalan terus. Siapa yang menjalankan adalah oknum, oknum yang menjalankan. Oleh karena itu tidak manfaat yang kita dapatkan dengan melarang karena tetap berjalan ekspornya, tidak legal tapi dimanfaatkan oknum-oknum tertentu. Itu yang korban adalah nelayan, yang tadinya bisa menikmati harga 200.000 per 1 biji koral donat tinggal 20.000 yang bisa didapatkan. Itu yang kita perjuangkan. Kalau ingin dikaji silakan, silakan melakukan pengkajian, tetapi jangan mengkaji sampai tidak ada batas ya, tiada batas. Oke lah sampai dengan bulan November ini, Desember juga harus ada hasil pengkajian sebagaimana tadi yang diminta oleh Pak Dirjen ya. Sampai dengan Desember ada hasil pengkajian, saya kira itu Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik.

F-PKB (LULUK NUR HAMIDAH, M.Si., M.PA.):

Tambahan Pak Ketua, sebenarnya untuk merespon juga tadi yang disampaikan oleh beliaunya. Ini kan kita ini punya pintu gerbangnya ya kan untuk bisa keluar sama masuk jadi kalau ada problem soal *enforcement* kan itu kan dianggap ilegal berarti kan soal penegakan hukum soal *enforcement*. Kemudian perlu juga di *check* Badan Karantinanya, saya sih kok perlu suatu ketika mungkin perlu sidak ke sana deh kayak bagaimana sih penanganannya Badan Karantinanya ini? Begitu sehingga yang tadi dibilang sudah dilarang kok bisa lolos? Terus kita diam saja begitu? Gitu lho Pak Ketua.

Terima kasih.

KETUA KOMISI IV DPR RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Pimpinan, masuk Ibu tadi *checknya* kemana? Ya kan Jumat kan ada, Kamis kan ada kunjungan ke Bali. Ditinjau saja, Kamis kan ada kunjungan kerja ke Bali. Ditinjau saja apakah peralatannya cukup? Ini kan persoalan. Kalau ke sana ninjau terus cuma tengak-tengok tengak-tengok pulang nggak ada hasilnya. Yang saya inginkan kita Komisi IV mendukung penuh Pemerintah untuk peralatan labnya. Kalau di sana ada karantina tapi alatnya nggak ada untuk apa? Sampai saya pernah bilang di depan itu Menteri yang lama, di Lampung itu ada BKIPM, kantornya bagus, mewah, bisa melihat laut. Saya bilang mau disewakan nggak, untuk kost-kostan di situ kalau kosong? Sampai saya ngomong begitu waktu itu karena tempatnya bagus, gedungnya bagus, *viewnya* bagus, alatnya kagak ada, ya percuma. Kan ini persoalannya, jadi kita Komisi IV mendorong penuh. Apalagi ada teman-teman Banggar, dibantu untuk peralatannya. Silakan *toh*, yang penting peralatannya baik. Ini kan yang terjadi contohnya karantina pertanian di bandara itu. Jadi kalau barang masuk tahu nggak tahu ya sudah kayak paranormal kayak dukun. Kayaknya ini ada yang bawa daging ini atau *nyelongok-nyelongok* dibelakangnya itunya bea cuka. Ini yang terjadi kenapa nggak beli alat sendiri? Itu lho.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik.

Pimpinan Yang saya hormati

Ini masih banyak Pimpinan yang lain. Jadi pada prinsip dasar adalah ada dua kerangka berpikir. Yang satu kerangka berpikir adalah bahwa keuntungan dari konservasi bukan hanya keuntungan dalam bentuk materi tetapi juga immateri yang didapat dalam bentuk materi juga. ketika tempat ikan itu tumbuh, maka ikannya menjadi banyak, jenisnya menjadi beraneka ragam, bisa jadi harga bisa jadi mahal. Tergantung kita bagaimana kecerdasan kita memahami itu. Tetapi di satu sisi juga ada kepentingan untuk melakukan bahasa kasar penjualan. Nah dalam sehingga saya katakan ada yang lebih arif, bahasa kita bukan bahasa sudut pandang kita, tapi bahasa kita adalah harus berdasarkan bahasa *research* gitu lho bahasa *research*. Sehingga silakan Bapak menjawab dalam sudut pandang Bapak mana yang lebih menguntungkan bagi kepentingan Negara masyarakat. Kalau misalnya diberikan waktu untuk melakukan riset dan kemudian melakukan pemaparan, kesanggupannya adalah sampai tanggal berapa bulan berapa Bapak bisa membuat laporan?

Terima kasih.

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI, S.T.):

Baik.

Pimpinan, Anggota yang saya hormati

Terima kasih sudah memberikan masukan kepada kami, kertas posisi kami Pak, yang kami sampaikan di awal itu adalah membuka setelah pertengahan Desember kita kaji, kita akan buka yang budidaya dulu Pak. Kami bisa sampaikan di presentasi kami dan juga tadi Pak Wiratno dari KLHK juga menyampaikan. Memang ada, dari Monev Pak, kami ini di awal tahun dipanggil Ombudsman disuruh melakukan Monev. Monev yang dilakukan adalah memang ada yang *teroverlay* Pak. Ada yang kawasan konservasi diambil koralnya, kan lebih arif bahwa berilah kami waktu sampai pertengahan Desember untuk memaparkan hasil kajian termasuk kawasan konservasi karena nanti dibantu oleh.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Interupsi Pak Ketua.

Kalau hanya kalangan budidaya yang memanfaatkan ekspor itu hanya pengusaha bukan nelayan. Yang kita perjuangkan ini adalah nelayan. Nelayan tidak membudidaya, mengambil dari alam ya. Olehnya itu saya sependapat dalam rangka untuk keberlanjutan maka di area konservasi sama sekali dilarang, tidak boleh diambil apapun di situ ya. Tapi alam yang berlebih, karena ini miliknya rakyat, maka kita kasih kesempatan kepada masyarakat memanfaatkan itu secara terpilih dan terbatas.

Terima kasih Pak.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik terima kasih.

Kita bisa memahami penuh bahwa masyarakat punya keluasan untuk mengambil di area alam yang terbuka bahasa kasarnya, bukan konservasi. Tetapi bahwa apakah ada jaminan mereka bisa terpilih mengambilnya atau tidak. Saya katakan silakan Bapak barangkali yang lebih paham dari itu berikan penjelasan sampai kapan?

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI, S.T.):

Baik, Bapak.

Tadi kami sampaikan Undang-Undang kami memperbolehkan budidaya. Tadi yang disampaikan dipresentasi kami dan juga KLHK ada bagian-bagian yang memang terlanggar Pak. izinkan kami bersama KLHK Bapak, ini waktunya Desember Pak. Kan tahun depan juga kuotanya juga mulai lagi, izinkan kami lebih berhati-hati Pak. Koral alam ini tadi disampaikan dipresentasinya KLHK ada yang masuk di kawasan konservasi kita kawal Pak. Izin yang memberikan kuota adalah KLHK Pak, kami akan perkuat tetapi waktunya Pak, kami mohon waktu seperti itu. Karena kalau kajiannya tidak lengkap saya tadi kami sampaikan dipresentasi setidaknya keuntungan 29 juta dollar, dari ikan karang setiap tahun itu juga besar Pak. Ikan karang juga yang menangkap juga nelayan ikan karang, sama Pak. Jadi kami perbolehkan Pak kali ini, targetnya adalah Desember Pak, bersama termasuk KLHK ini bagaimana sih menentukan titik lokasi, bagaimana

pengawasan setiap waktunya? Kita akan kehilangan sesuatu yang akan nggak akan balik lagi kalau kita nggak hati-hati Pak, Desember Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik, terima kasih.

Dua-duanya punya sudut pandang yang baik. Yang pertama adalah diambil koralnya itu keuntungan ekonomi. Yang kedua dipertahankan koralnya juga keuntungan ekonomi. Yang ini dapat koral, yang ini dapat ikan kan gitu. Yang ini lebih lama umurnya, yang ini bisa jadi pendek kan gitu. Sehingga kalimatnya adalah saya tawarkan gitu kan, meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup, Perikanan untuk, gini kan, melakukan pengkajian secara bersama dengan KLHK gitu kan, terhadap kebijakan pemberian sertifikat kesehatan itu, selambat-lambatnya dilaporkan ke rapat RDP ini pada tanggal 15 Desember 2019. Kalau itu disetujui nggak? Ya. Itu tinggal kalimatnya disederhanakan, intinya adalah kedua-duanya diberikan ruang untuk melakukan pengkajian secara holistik terhadap kebijakan tersebut selambat-lambatnya 15 Desember 2019 sudah disampaikan dalam RDP. Setuju?

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Saya minta sedikit koreksi, Pimpinan.

Barangkali bisa dikembalikan ke awal tadi kalau bisa. Saya hanya ingin menambah di bawahnya, pada akhir bulan itu dihilangkan, di bawahnya, setelah dilakukan kajian oleh KKP dan KLHK selambat-lambatnya pada bulan Desember, ya dan LIPI. Tetap di atasnya meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk memberikan bukan kajian di awal tadi, di awal, konsep awal, tadi konsep awal. Selambat-lambatnya ini distop situ ya, transplantasi koma, setelah iya, setelah dilakukan kajian ya secara holistik antara Kementerian KKP dan KLHK dan LIPI selambat-lambatnya pada bulan Desember 2019.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Kan kalau yang untuk budidaya kan sudah tidak ada masalah kan? Artinya itu tetap berjalan sampai sekarang. Kan yang dimasalahkan ini adalah nggak jalan, distop juga, oh iya. Kalau kalimatnya ini, baca dulu silakan. Berarti kalimatnya bukan agar. Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dapat, kalau agar itu sudah menjadi hal yang pasti. Kan ini mau dikaji dulu, kalau hasil pengkajiannya ternyata, kan ini membuat kesimpulan belum pengkajian. Jadi kalimatnya adalah bahwa izin sertifikat begitu kan peredaran dapat diberikan setelah dilakukan pengkajian secara holistik oleh bla bla bla paling lambat pada tanggal.

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI, S.T.):

Izin Pimpinan.

Kalau boleh disepakati berhenti sampai bulan Desember 2019, pastinya nanti kalau diperbolehkan kan mendukung PMBP dan yang lain-lain. Yang untuk mendukung pencapaian target realisasi impor sampai seterusnya itu tidak perlu dimasukkan.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Iya, jadi intinya adalah Komisi IV meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk dapat kembali memberikan pelayanan sertifikat kesehatan dalam peredaran perdagangan koral, karang hias baik yang berasal dari laporan transparansi setelah dilakukan kajian secara holistik bersama-sama Kementerian Lingkungan Hidup. Jadi pemberian itu setelah ada pengkajian dulu, kalau pengkajiannya ternyata ini, baik, setuju?

(RAPAT: SETUJU)

KETUA KOMISI IV DPR-RI/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Izin Pimpinan.

Pak Dirjen KSDAE, yang mengeluarkan izin kan Bapak. segera Bapak buat surat edaran, apabila eksportir terbukti menerima, menampung karang dari wilayah konservasi, sanksinya izinnnya dicabut Pak. Menampung maupun mengekspor Pak. Karena tidak mungkin maling sendiri, paling nggak nelayan yang mengambil, dijual ke eksportir, nah itu dicabut aja izinnnya Pak. Sanksinya harus keras Pak, karena kalau sudah di wilayah konservasi sangat-sangat merusak alam, ya Pak ya? Tolong Bapak bikin surat edaran karena Bapak yang mengeluarkan izin, itu saja Pak.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Baik, intinya adalah semangat Komisi IV terhadap konservasi yang sangat tinggi harus diimbangi oleh tindakan nyata dari Kementerian terhadap para pelanggar konservasi. Kan kemarin bakar hutan, sekarang laut, Bapak harus berani. Kita saja berani, masa Bapak ngga berani.

Baik, sekarang yang ketiga. Komisi IV DPR RI mendukung kebijakan, pemanfaatan dan peredaran atau perdagangan koral/karang hias dalam rangka mengurangi pengambilan karang hias dari alam. Nah ini yang tadi harus kan sudah tadi, nggak relevan lagi,

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI, S.T.):

Izin Pak.

Nomor tiga tadi kan kita belum melakukan kajian, biarkan saja dihapus Pak.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Ya sudah, berarti dihapus nggak ada. Nomor tiga berikutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan ya, ya kita tanya kita hapus, setuju? setuju Bapak?

(RAPAT: SETUJU)

Udah, jadi nomor tiga berikutnya, Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta LIPI untuk segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi secara intensif serta sosialisasi atas kawasan perairan. Udah sepakat kalau ini ya? Sepakat Bapak?

(RAPAT: SETUJU)

Yang keempat, Komisi IV DPR RI meminta Pemerintah segera melakukan koordinasi dan sinkronisasi intern untuk menyelesaikan permasalahan kewenangan sebagai otoritas atau pengelola *management authority* terkait pelaksanaan pemanfaatan dan pengelolaan tumbuhan dan satwa dilindungi diwilayah perairan. Sepakat? Ketuk?

(RAPAT: SETUJU)

Udah.

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI, S.T.):

Bisa ngga nih melakukan koordinasi, biasanya sulit itu.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Kita DPR aja beda Partai bisa, masa Pemerintah nggak akur. Termasuk yang jadi titik fokus itu ada perbedaan Undang-Undang itu Pak, harus diselesaikan. Berarti yang dipakai yang Bapak, bukan yang di KLH, kan yang KLH boleh di Bapak jangan. Saya ikut yang jangan lho Pak.

Yang kelima, Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama-sama dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan serta LIPI untuk terus melakukan koordinasi secara intensif dalam rangka melaksanakan pengawasan, pengelolaan dan pemanfaatan koral/karang hias di Indonesia, *slidenya* ini yang tadi itu. Sudah, sepakat dihapus nggak yang ini? Ya, sepakat?

(RAPAT: SETUJU)

Sudah.

ANGGOTA RAPAT:

Mengenai pengawasan kan kita belum pernah (suara tidak jelas). Sebaiknya ada proses pengkajian bersama lalu kelanjutannya adalah pengawasan

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Sudah ada tadi dimasukin.

**DIRJEN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Ir. WIRATNO,
M.Sc.):**

Itu khusus monitoringnya bersama Bapak, dari pengawasannya ini belum ada, bersama LIPI, KLHK, dan KKP.

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Udah, kesimpulan ke enam. Komisi IV meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup, Kelautan dan LIPI secara bersama-sama melakukan monitoring dan pengawasan terhadap keutuhan. Itu yang bahasanya itu konservasi sumber daya laut gampang, itu aja intinya itu lah. Susah susah amat. Intinya itu Bapak harus kompak jagain laut, kalau nggak saya datengin Ratu Kidul nanti. Baik, sudah kan? Terakhir kalimat, untuk melakukan dan monitoring terhadap pengelolaan sumber daya kelautan dan menjaga keutuhan konservasi sumber daya lautan. Bikin kampung adat di tengah laut sebentar lagi. Sudah? Itu tinggal, itu kan redaksional saja. Prinsip dasar tadi sudah disepakati, tidak ada yang krusial, setuju? Baik.

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Seluruh rangkaian RDP ini sudah selesai, kesimpulannya sudah kita sepakati, titik koma dan redaksional dibetulkan secara baik berulang-ulang, selanjutnya Bapak memberikan tanggapan.

Terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN RUANG LAUT KEMENTERIAN
KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRAHMANTYA SATYAMURTI POERWADI,
S.T.):**

Pimpinan, Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Terima kasih atas waktunya Pak untuk mendengarkan masing-masing pihak dan harapannya konservasi Indonesia yang merupakan salah satu hal yang ingin kita capai bersama demi kelangsungan kehidupan perikanan dan nelayan kita untuk maju dan mandiri bisa terlaksana dengan kerja bersama.

Terima kasih.

Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (DEDI MULYADI, S.H.):

Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh

Bapak dan Ibu yang saya hormati,

Seluruh rangkaian RDP sudah selesai. Kita tutup acara RDP ini dengan *alhamdulillahirobbil alamin* bagi yang beraga muslim.

Dengan ini rapat dinyatakan ditutup.

(RAPAT DITUTUP PUKUL: 17.22 WIB)

Terima kasih.

*Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sampurasun.*

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
196301221991031001